**SALINAN**

**BUPATI LEBAK**
**PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 900/Kep.423-BKAD/2022

TENTANG

PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lebak tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.

KEDUA : Tujuan dilaksanakannya ETPD adalah untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.

KETIGA : Jenis pendapatan daerah yang akan dielektronifikasi meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.

KEEMPAT : Jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasi meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.

KELIMA : Rincian jenis pendapatan daerah, jenis belanja daerah, target tahun pencapaian ETPD dari masing-masing jenis pendapatan dan belanja daerah, serta informasi lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA LEBAK

WIWIN BUDHIYARTI, SH.,MA
NIP. 19810228 200604 2 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
Nomor : 900/Kep.423-BKAD/2022
Tanggal : 28 April 2022
Tentang : Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak

**PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak merupakan daerah otonom di Provinsi Banten yang secara astronomis terletak pada 6°18' - 7°00' Lintang Selatan dan 105°25' - 106°30' Bujur Timur. Dengan bentang alamnya tersebut, Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah mencapai 331.150,53 Ha yang kurang lebih mencapai 34,20 % dari luas wilayah Provinsi Banten. Kecamatan Cibeber, salah satu kecamatan terluar yang berbatasan dengan Kecamatan Cisolok di Desa Cicadas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yang mencapai 40,105.77 Ha atau sekitar 12,11% dari luas wilayah Kabupaten Lebak, karena sebagian wilayahnya termasuk dalam otorita Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) yang membentang hingga ke wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Kalanganyar yang hanya sekitar 0,87 % dari luas wilayah Kabupaten Lebak, atau kurang lebih 2.889,28 Ha yang terdiri dari 7 desa.

Secara geografis Kabupaten Lebak terletak di bagian Selatan Provinsi Banten, bersebelahan dengan Kabupaten Pandeglang di bagian Baratnya. Bentuk wilayah yang membujur dari Utara ke Selatan menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang dan sebagian dengan Kabupaten Tangerang di batas bagian Utaranya. Di bagian Timurnya berbatasan dengan dua kabupaten paling Barat Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Sedangkan pada bagian Selatannya

Kabupaten Lebak terkoneksi langsung dengan Samudera Indonesia sehingga memiliki wilayah laut mencapai 588.745 $Km^2$ dan dengan panjang pantai mencapai 91,42 Km.

Secara administratif Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, 340 desa, dan 5 kelurahan. Di samping itu, terdapat sebanyak 6.325 Rukun Tetangga (RT) dan 1.769 Rukun Warga (RW) yang merupakan perangkat masyarakat yang membantu memfasilitasi sebagian fungsi pelayanan publik dan pemerintahan sehingga mampu mengatasi problem aksesibilitas secara geografis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lebak.

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Lebak

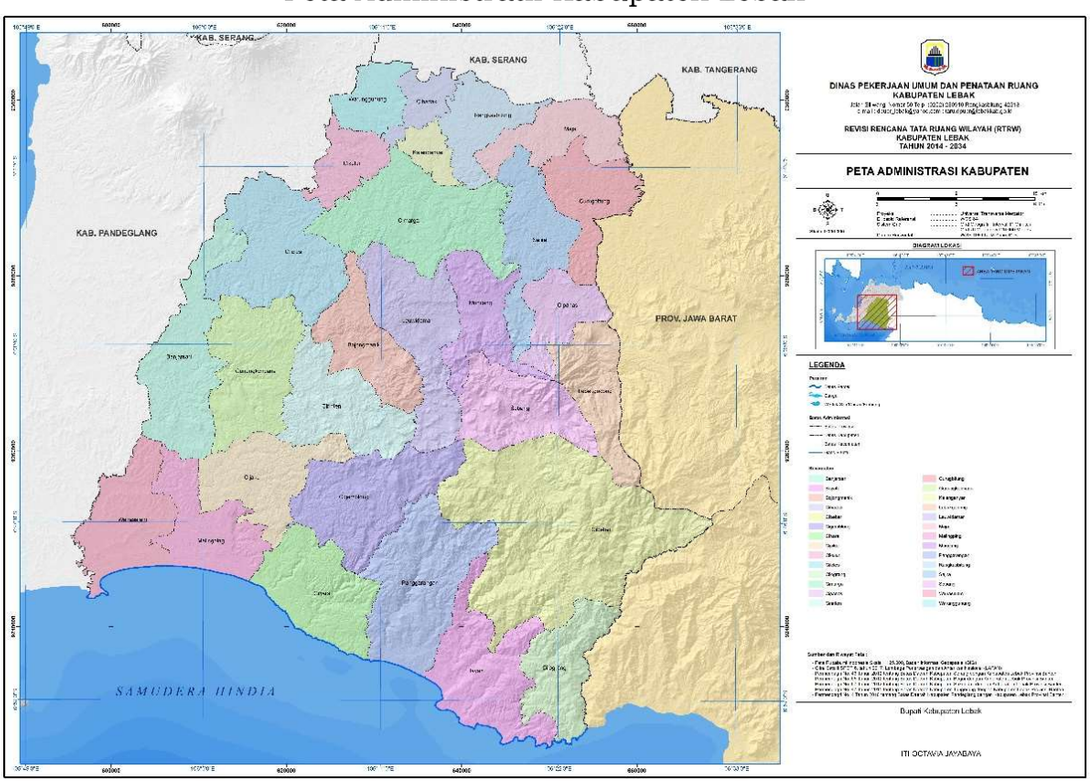


*Sumber : Peta RTRW Kabupaten Lebak 2014-2034*

Dengan bentang alam yang sangat luas dan topografi wilayah yang berbukit dan bergunung, aksesibilitas menjadi salah satu isu utama terkait dengan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan daerah. Problem aksesibilitas ini terutama masih akan dihadapi oleh masyarakat di wilayah bagian Selatan,

yang jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten berkisar jarak antara 99 hingga 160 Km. Belum lagi dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang belum memadai dan tidak mudah untuk diakses, bahkan di beberapa desa merupakan *blank spot area* karena ketiadaan prasarana telekomunikasi.

Kabupaten Lebak dilalui oleh 3 Wilayah Sungai (WS) yaitu Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Ciliman-Cibungur, dan Cibaliung-Cisawarna; 16 Daerah Aliran Sungai (DAS); dan 183 sungai sepanjang 2.701 Km. Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di Provinsi Banten, yang alirannya melintasi Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Mata air Sungai Ciujung sangat dilindungi oleh Masyarakat Adat Kanekes karena berada di kawasan Hutan Sasaka Buana/Pada Ageung di bagian Selatan Kampung Cikeusik dan Hutan Sakral Sasaka Domas di kawasan hulu Sungai Ciparahiang anak Sungai Ciujung, bagian Selatan Kampung Cibeo, Baduy Dalam. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Ciujung mencapai kurang lebih 1.850 $Km^2$ dengan panjang mencapai 142 Km hingga bermuara di Teluk Pontang Kabupaten Serang, Pantai Utara Laut Jawa.

Berdasarkan klimatologi, Kabupaten Lebak termasuk wilayah yang memiliki curah hujan yang tinggi yaitu berkisar antara 2.000 hingga lebih dari 5.000 mm/tahun. Curah hujan terbesar berada di bagian Timur, di daerah pegunungan yang masuk kawasan TNGHS. Sedangkan curah hujan terendah berada di bagian Utara Kabupaten Lebak.

Berdasarkan karakteristik dan kondisi geografis sebagaimana dijelaskan di atas, Kabupaten Lebak memiliki potensi yang sangat besar disektor primer, terutama sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, termasuk sektor pertambangan dan penggalian. Kabupaten Lebak adalah daerah yang dalam jangka menengah masih akan mengandalkan sektor pertanian sebagai penggerak utama bagi pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kontribusi sektor pertanian yang masih sangat dominan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mencapai 27,03% pada tahun 2020 atau sebesar Rp. 7,858 Triliun dari total PDRB sebesar Rp. 29,076 Triliun, merupakan *evidence* objektif dari potensi disektor ini. Potensi pertanian

tanaman pangan yang tersebar di hampir seluruh kecamatan, menjadikan Kabupaten Lebak memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan secara regional. Demikian pula dengan potensi pengembangan industri berbasis pemanfaatan komoditi pertanian yang memiliki prospek sangat besar, serta potensi industri pariwisata, perdagangan, dan UMKM yang masih dapat terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan komoditi pertanian setempat, sehingga terdapat integrasi yang nyata antara upaya meningkatkan kapasitas perekonomian daerah di satu sisi dengan upaya memberdayakan potensi ekonomi masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

**Grafik**
**10 Penyumbang Terbesar PDRB (adhb)**

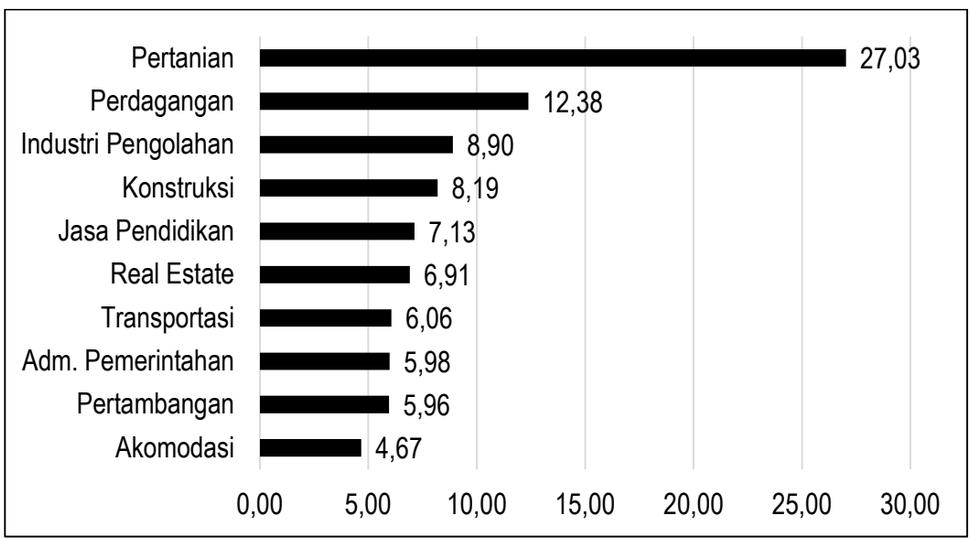


*Sumber: Kabupaten Lebak Dalam Angka, 2021*

Disamping sektor pertanian, sektor perdagangan dan industri pengolahan juga memiliki potensi pengembangan yang besar dimasa depan, apalagi dengan dukungan sejumlah proyek infrastruktur strategis yang mulai memasuki fase fungsionalisasi, antara lain jalan tol Serang-Panimbang, pembangunan Waduk Karian, revitalisasi jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan, serta pembangunan Kota Baru Publik Maja. Saat ini sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap PDRB adhb dengan kontribusi sebesar 12,38%, disusul dengan sektor industri pengolahan sebesar 8,90% (BPS, 2021). Sektor pariwisata diharapkan juga akan makin berkembang ke depannya seiring

Pembangunan sejumlah proyek infrastruktur strategis. Potensi wisata sejarah dan budaya, wisata buatan, dan wisata alam termasuk pemanfaatan dari situs warisan geologi melalui pengembangan *Geopark Bayah Dome*.

Merujuk pada data BPS (2021), penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2020 mencapai 1.386.793 jiwa, terdiri dari 714.052 laki-laki dan 672.741 perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 106. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2019 sebanyak 1.294.224 jiwa. Dengan jumlah tersebut, laju pertumbuhan penduduk tercatat rata-rata sebesar 1,68% (dirinci angka kelahiran dan angka perpindahan penduduk) dalam lima tahun terakhir dengan pertumbuhan tertinggi terdapat di Kecamatan Curugbitung dan Cikulur masing-masing sebesar 3,48% dan 3,45%.

**Grafik 2.3**
**Piramida Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2020**

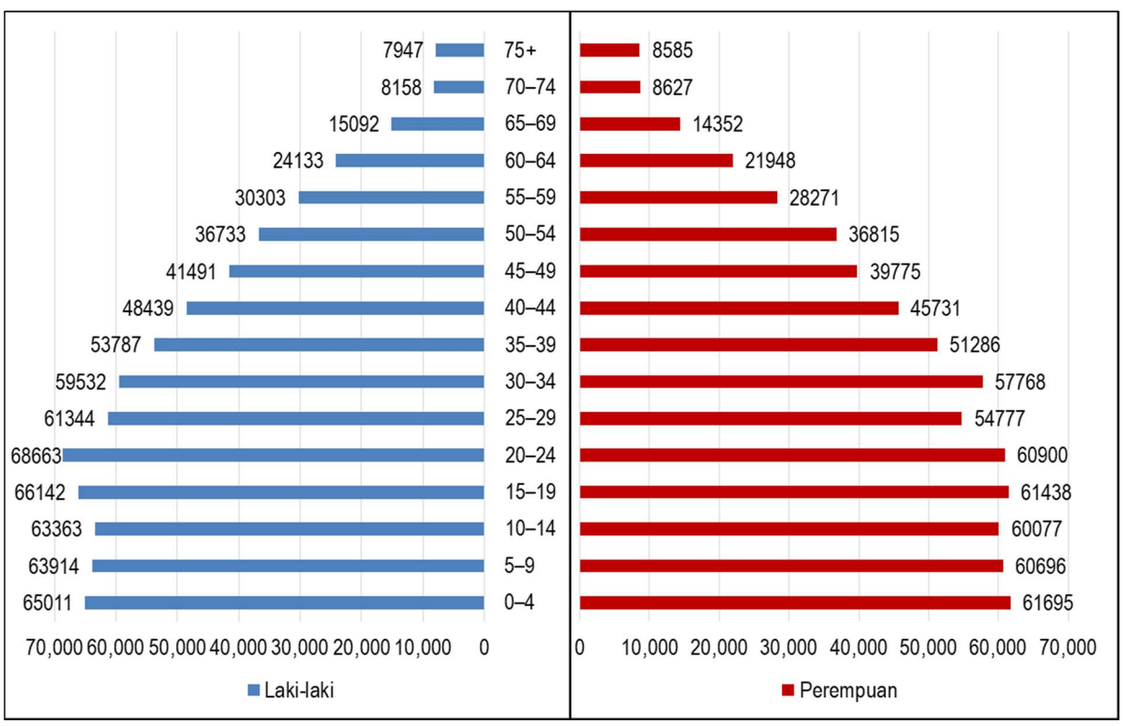


*Sumber : Kabupaten Lebak Dalam Angka, 2021*

Sebagian besar penduduk Kabupaten Lebak adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang jumlahnya mencapai sekitar 68,45% atau sebanyak 949.276 jiwa. Sekitar 4,53% penduduk merupakan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas), dan sekitar 34,38% lainnya merupakan

penduduk usia anak-anak (0-18 tahun). Dengan proporsi penduduk usia produktif dan tidak produktif di atas, maka rasio ketergantungan di Kabupaten Lebak mencapai sebesar 46,09%.

Profil kependudukan Kabupaten Lebak secara umum tak banyak mengalami perubahan pada dasawarsa terakhir. Konsentrasi penduduk misalnya, terdapat di Kecamatan Rangkasbitung dengan persentase sekitar 9-10%, diikuti dengan Kecamatan Cimarga, Cibadak, dan Malingping sekitar 5%. Demikian pula dengan kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Rangkasbitung sebesar 2726 jiwa/$Km^2$, diikuti Kecamatan Cibadak, Kalanganyar, dan Warunggunung masing-masing sebesar 1714 jiwa/$Km^2$, 1499 jiwa/$Km^2$, dan 1252 jiwa/$Km^2$. Adapun kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Lebak adalah sebesar 455 jiwa/$Km^2$ (BPS, 2021). Seiring dengan pembangunan Kota Baru Publik di Kecamatan Maja, pada dasawarsa ke depan diproyeksikan akan terjadi perubahan profil kependudukan khususnya di wilayah Kecamatan Maja dan sekitarnya. Saat ini Kecamatan Maja berpenduduk sebanyak 59.705 jiwa atau sekitar 4,31% dari total penduduk Kabupaten Lebak, dengan pertumbuhan penduduk sekitar 2,41% per tahun, serta kepadatan penduduk sebesar 997 jiwa/$Km^2$ (BPS, 2021).

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Kabupaten Lebak memiliki jumlah penduduk yang masuk dalam usia kerja (≥15 tahun) sebanyak 906.799 jiwa pada tahun 2019. Bila melihat data 5 (lima) tahun terakhir, setiap tahunnya selalu meningkat dan berpotensi menyentuh angka 1.000.000 jiwa beberapa tahun ke depan. Hal tersebut bisa saja terjadi jika merujuk pada Siaran Pers Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang bonus demografi pada tahun 2030-2040. Yang mana Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi yakni jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari yang tidak produktif (<15 dan >64 tahun), termasuk juga Kabupaten Lebak.

Penduduk usia kerja terbagi lagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja pada tahun 2020 berjumlah 659.902 jiwa, naik dibandingkan tahun 2019. Jumlah

penduduk yang bekerja pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan dari sebanyak 540.410 jiwa pada tahun 2019 menjadi 596.375 jiwa pada tahun 2020. Demikian pula dengan jumlah pengangguran yang mengalami kenaikan menjadi 63.527 jiwa sehingga mengakibatkan penyempitan gap antara angkatan kerja yang bekerja dengan angkatan kerja yang menganggur.

Sejalan dengan penyempitan gap antara angkatan kerja yang bekerja dengan angkatan kerja yang menganggur sebagaimana yang ditunjukan pada grafik di atas, akan berdampak pada peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka secara signifikan. Dari hasil analisis TPT di Kabupaten Lebak pada 3 (tiga) tahun terakhir secara faktual cenderung mengalami penurunan, meski pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada angka 9,63% atau naik sekitar 1,58% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini tentu berkaitan erat dengan fenomena pandemi dan dampak yang ditimbulkannya pada perekonomian daerah maupun nasional.

**Grafik 2.18**
**Penduduk Usia Kerja dan Pengangguran**
**Tahun 2018 – 2020**

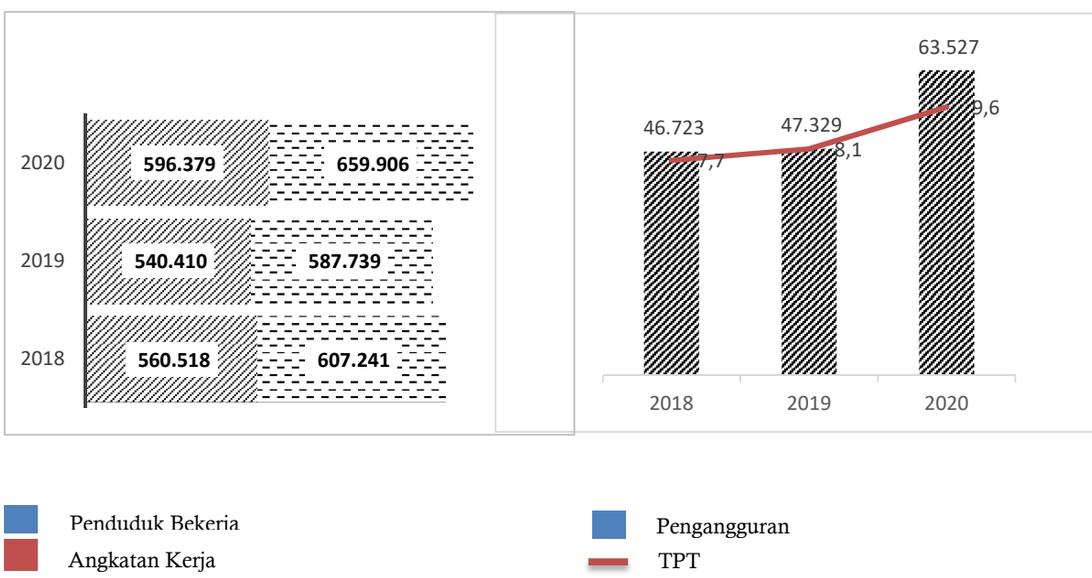


*Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2021*

Perkembangan jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2020 berbanding terbalik dengan jumlah penduduk angkatan kerja, dimana untuk jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2020 sebesar 283.275 jiwa mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 319.060 sedangkan untuk jumlah penduduk Angkatan kerja mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 659.906 jiwa dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 587.739 jiwa . Peningkatan tajam yang terjadi pada jumlah penduduk angkatan kerja akan berdampak pada menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2020 sebesar 63,46% dibanding tahun 2019 sebesar 65,06%. Sedangkan untuk Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengalami kondisi yang sama pada tahun 2020 sebesar 91,50% menurun dari tahun 2019 sebesar 92,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya gap yang cukup lebar antara TPAK dan TKK, yang mengindikasikan bahwa kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Lebak telah dimanfaatkan oleh tenaga kerja dari luar Kabupaten Lebak, sehingga perlu dilakukan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini agar daya serap tenaga kerja lokal dapat benar-benar optimal.

**Grafik 2.19**
**Partisipasi dan Kesempatan Kerja**
**Tahun 2018 - 2020**

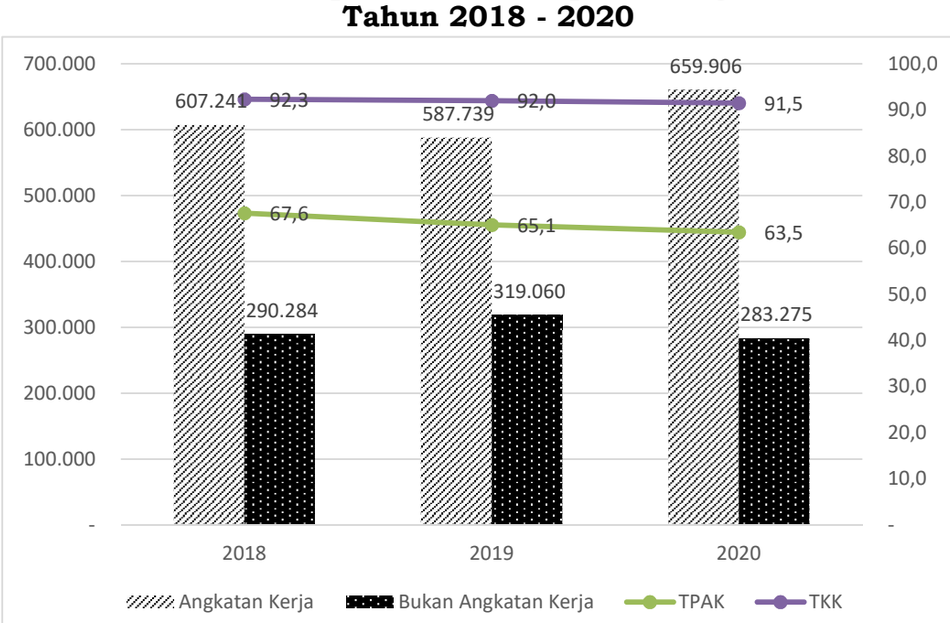


*Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2021*

## 1.2 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat secara makro dapat diukur dari beberapa indikator, seperti: indeks pendidikan, indeks kesehatan, indeks infrastruktur dasar, persentase akses air minum, persentase akses sanitasi, tingkat penganguran terbuka, indeks pembangunan gender, laju pertumbuhan penduduk, daya beli masyarakat, persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, PDRB per kapita, dan indeks Williamson. Pada bagian ini disajikan pula analisis mengenai pertumbuhan ekonomi (LPE), PDRB, dan kemiskinan. Meski indikator-indikator tersebut umumnya digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang kesejahteraan rakyat mengingat sifatnya yang merupakan komposit dari fungsi perekonomian.

LPE misalnya, merepresentasikan kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun, yang diperoleh dari perbandingan pertambahan PDRB pada tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Sedangkan PDRB itu sendiri merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah pada periode tertentu. Dalam kondisi normal, LPE Kabupaten Lebak tumbuh progresif di atas rata-rata nasional maupun provinsi selama periode tahun 2016-2019. Pola serupa juga masih dapat dipertahankan pada tahun 2020 ketika perekonomian nasional maupun daerah terpuruk karena terdampak dahsyat oleh pandemi COVID-19 hingga mengalami kontraksi cukup dalam hingga minus 0,88 %, LPE Provinsi Banten minus 3,38 %, dan LPE nasional minus 2,10 %. Berdasarkan sejumlah data empiris, melambatnya perekonomian nasional maupun daerah pada tahun 2020 terjadi karena beberapa faktor yang secara akumulatif mempengaruhinya, yaitu:

1. Terkonsentrasinya sumber daya dalam rangka pengendalian pandemi, yang dimanifestasi melalui kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran yang secara langsung berdampak pada implementasi program pembangunan, khususnya sektor perekonomian;
2. Menurunnya produksi akibat turunnya permintaan pasar, yang berimbas pada kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja yang dirumahkan, serta tidak tersedianya lowongan kerja baru sehingga

mendorong peningkatan angka pengangguran;

3. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro) berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian, baik pada sisi produksi maupun konsumsi; serta
4. Belum optimalnya Program Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Lebak sehingga berdampak pada tingkat efektifitas implementasi stimulus kebijakan dalam rangka menahan penurunan aktivitas perekonomian.

**Grafik 2.4**
**Perkembangan PDRB Kabupaten Lebak,**
**LPE Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Lebak Tahun 2016 – 2020**

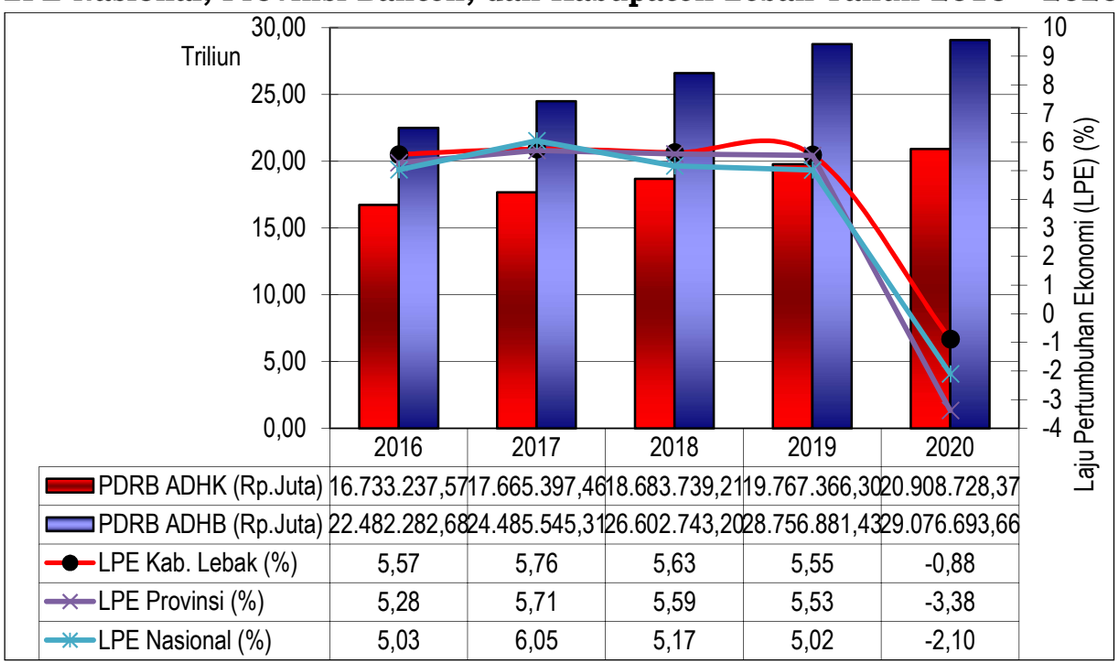


| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDRB ADHK (Rp.Juta) | 16.733.237,57 | 17.665.397,46 | 18.683.739,21 | 19.767.366,30 | 20.908.728,37 |
| PDRB ADHB (Rp.Juta) | 22.482.282,68 | 24.485.545,31 | 26.602.743,20 | 28.756.881,43 | 29.076.693,66 |
| LPE Kab. Lebak (%) | 5,57 | 5,76 | 5,63 | 5,55 | -0,88 |
| LPE Provinsi (%) | 5,28 | 5,71 | 5,59 | 5,53 | -3,38 |
| LPE Nasional (%) | 5,03 | 6,05 | 5,17 | 5,02 | -2,10 |

*Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2021*

Pandemi tak hanya berdampak pada melambatnya perekonomian daerah, namun juga mengubah struktur perekonomian daerah secara sangat signifikan. Lima sektor basis yang menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Lebak pada dasawarsa terakhir (pertanian, perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan), sebagian besar terpuruk dan hanya menyisakan sektor pertanian dan industri pengolahan yang masih bertumbuh positif masing-masing sebesar 3,54 % dan 1,34 % (BPS, 2021). Adapun 5 sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 adalah sektor informasi dan komunikasi dengan

pertumbuhan sebesar 8,72 %; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 5,87 %; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,31 %; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,54 %; dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,14 % (BPS, 2021).

Secara umum pertumbuhan pada sektor primer dalam PDRB pada lima tahun terakhir masih memberikan kontribusi terbesar, namun secara faktual pertumbuhannya cenderung melambat, hingga mencapai pertumbuhan terrendah pada tahun 2019 yaitu hanya sebesar 2,16%. Meskipun demikian, sektor pertanian dapat dianggap sebagai "penyelamat" perekonomian rakyat mengingat kontribusinya masih paling dominan yaitu mencapai 27,03 % bahkan saat perekonomian daerah terdampak dahsyat oleh pandemi. Pertumbuhan sektor ini juga masih tercatat positif 3,54% di tengah sebagian sektor lainnya mengalami pertumbuhan negatif, terutama pada tiga sektor yang selama dasawarsa terakhir menjadi tiga dari lima penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Lebak yaitu sektor perdagangan dengan pertumbuhan minus 5,52%; sektor konstruksi dengan perumbuhan minus 2,53%, serta transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan sebesar minus 4,37%. Sedangkan pada sektor sekunder dan tersier cenderung stabil, bahkan di beberapa sektor mengalami pertumbuhan signifikan.

Terpuruknya sejumlah sektor yang secara faktual banyak menyerap tenaga kerja, seperti: konstruksi, pertambangan dan penggalian, perdagangan, serta transportasi dan pergudangan, berdampak nyata terhadap meningkatnya angka pengangguran yang pada tahun 2020 tercatat mencapai 63.527 jiwa, meningkat signifikan dari tahun 2019 yang tercatat berjumlah 47.329 jiwa. Data Laju Pertumbuhan Ekonomi untuk setiap sektor pada Tahun 2016-2020 tergambar pada tabel dibawah ini.

**Tabel**

**Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010**

**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020**

| No | Lapangan Usaha | Tahun (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 6,06 | 4,54 | 3,55 | 1,84 | 3,54 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 3,49 | 0,66 | 0,45 | 0,32 | (7,81) |
| 3 | Industri Pengolahan | 1,89 | 5,21 | 2,56 | 5,93 | 1,34 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 18,89 | 4,63 | 4,23 | 3,09 | 1,01 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 5,25 | 4,39 | 5,09 | 5,09 | 5,87 |
| 6 | Konstruksi | 10,10 | 10,33 | 11,65 | 11,79 | (2,53) |
| 7 | Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3,60 | 5,48 | 8,17 | 5,63 | (5,52) |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 4,44 | 5,70 | 5,92 | 7,98 | (4,37) |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,83 | 7,88 | 7,80 | 8,41 | (5,71) |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 4,05 | 8,07 | 7,92 | 8,51 | 8,72 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 9,47 | 5,09 | 5,62 | 3,42 | 3,14 |
| 12 | Real Estate | 5,61 | 8,59 | 7,81 | 7,50 | 1,11 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 5,26 | 6,52 | 5,27 | 7,45 | (4,52) |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib | 9,06 | 5,12 | 4,95 | 6,83 | (0,94) |
| 15 | Jasa Pendidikan | 7,05 | 7,35 | 7,33 | 8,44 | 0,76 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9,49 | 9,67 | 8,63 | 9,96 | 5,31 |
| 17 | Jasa Lainnya | 6,81 | 7,61 | 6,47 | 6,83 | (6,08) |
| | **Rerata Laju Pertumbuhan** | **5,57** | **5,76** | **5,63** | **5,55** | **(0,88)** |

*Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2021*

Merujuk pada sejumlah data dan paparan di atas, tantangan terbesar perekonomian daerah Kabupaten Lebak adalah mengintegrasikan sektor pertanian yang masih menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk, serta masih menjadi sektor basis dengan kontribusi sangat dominan terhadap PDRB, dengan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif sehingga kedua sektor dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Integrasi kedua sektor di atas dapat dilakukan melalui skema pembangunan agrowisata unggulan, maupun pemberdayaan usaha mikro,

kecil dan menengah (UMKM), industri rumah tangga, serta industri kecil dan menengah dalam pengolahan komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan sektor pariwisata, baik berupa penyediaan makanan dan minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisatawan lainnya. Demikian pula dengan tantangan untuk mengintegrasikan sektor pertanian dengan dunia industri, khususnya industri pengolahan yang mampu menampung dan mengolah komoditas pertanian menjadi produk-produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap produktivitas perekonomian daerah.

Upaya mengoptimalkan produktivitas perekonomian daerah menjadi strategis dalam mendorong peningkatan PDRB per kapita secara makro, terutama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang saat ini kondisinya masih belum sesuai harapan. Secara umum PDRB per kapita Kabupaten Lebak masih jauh tertinggal di bawah capaian nasional maupun provinsi. Pada tahun 2020 PDRB per kapita Kabupaten Lebak tercatat hanya berkisar Rp.22,22 juta per tahun, sementara pada tingkat provinsi telah mencapai Rp.47,59 juta dan pada PDRB per kapita nasional telah mencapai Rp.56,90 juta per tahun. Meski demikian, pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Lebak menunjukkan progresifitas di atas pertumbuhan nasional maupun provinsi sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 2.5**
**Perbandingan PDRB per Kapita dan Pertumbuhannya**
**Tahun 2016-2020**

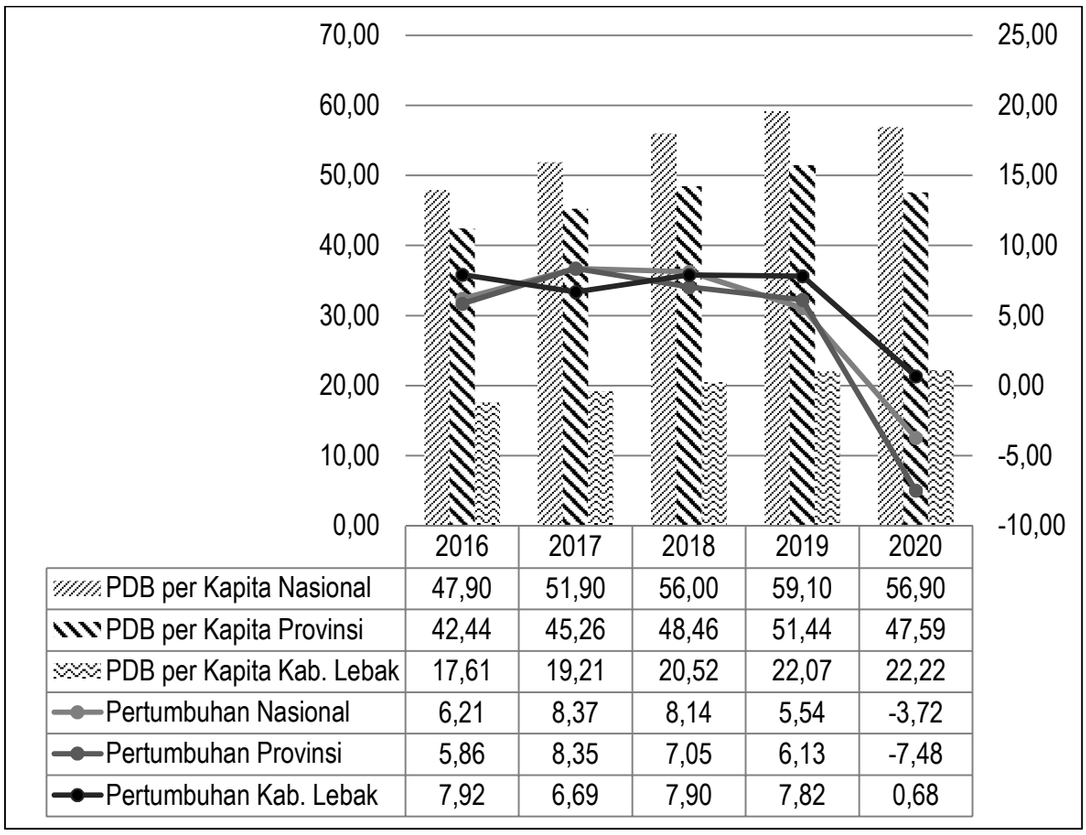


| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDB per Kapita Nasional | 47,90 | 51,90 | 56,00 | 59,10 | 56,90 |
| PDB per Kapita Provinsi | 42,44 | 45,26 | 48,46 | 51,44 | 47,59 |
| PDB per Kapita Kab. Lebak | 17,61 | 19,21 | 20,52 | 22,07 | 22,22 |
| Pertumbuhan Nasional | 6,21 | 8,37 | 8,14 | 5,54 | -3,72 |
| Pertumbuhan Provinsi | 5,86 | 8,35 | 7,05 | 6,13 | -7,48 |
| Pertumbuhan Kab. Lebak | 7,92 | 6,69 | 7,90 | 7,82 | 0,68 |

*Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2021*

**Grafik 2.6**
**Perkembangan Indikator**
**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Tahun 2018-2020**

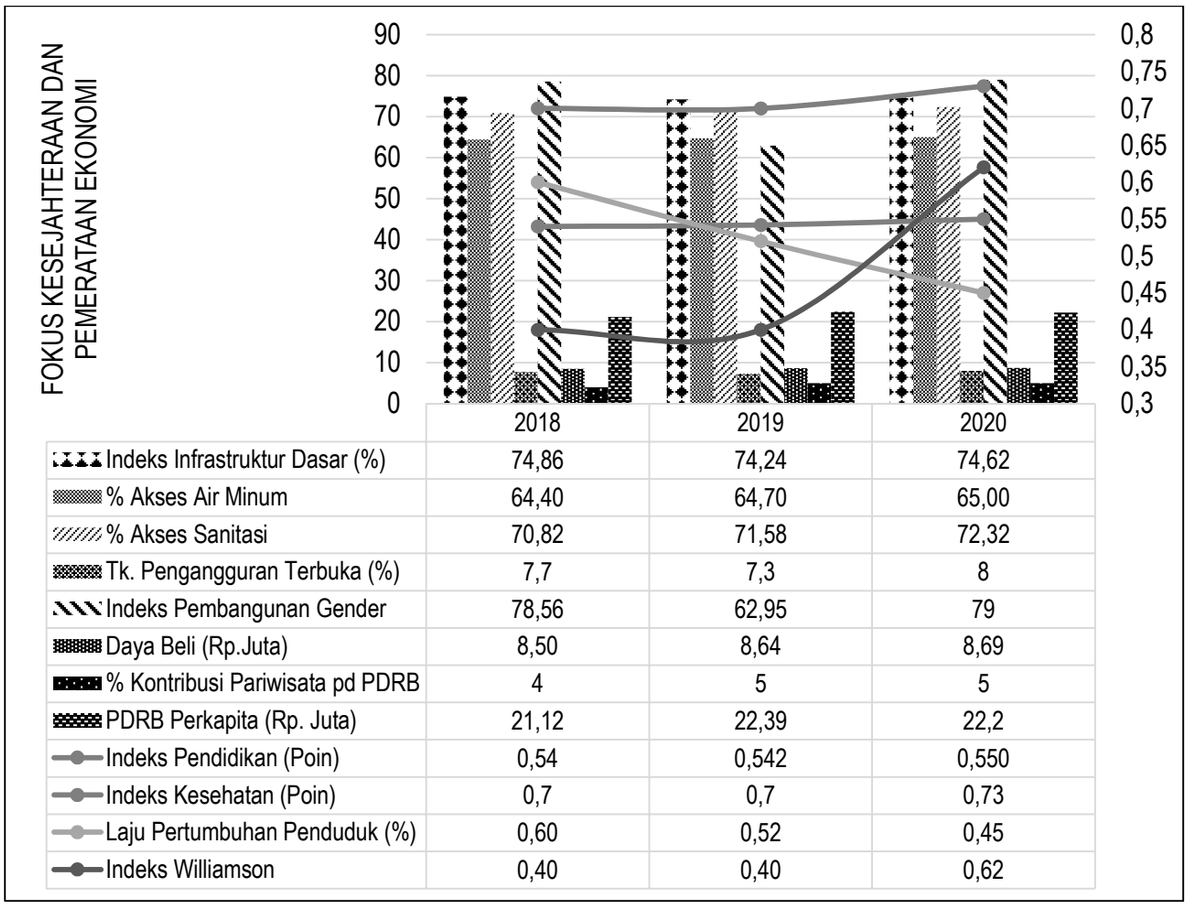


| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Indeks Infrastruktur Dasar (%) | 74,86 | 74,24 | 74,62 |
| % Akses Air Minum | 64,40 | 64,70 | 65,00 |
| % Akses Sanitasi | 70,82 | 71,58 | 72,32 |
| Tk. Pengangguran Terbuka (%) | 7,7 | 7,3 | 8 |
| Indeks Pembangunan Gender | 78,56 | 62,95 | 79 |
| Daya Beli (Rp.Juta) | 8,50 | 8,64 | 8,69 |
| % Kontribusi Pariwisata pd PDRB | 4 | 5 | 5 |
| PDRB Perkapita (Rp. Juta) | 21,12 | 22,39 | 22,2 |
| Indeks Pendidikan (Poin) | 0,54 | 0,542 | 0,550 |
| Indeks Kesehatan (Poin) | 0,7 | 0,7 | 0,73 |
| Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | 0,60 | 0,52 | 0,45 |
| Indeks Williamson | 0,40 | 0,40 | 0,62 |

*Sumber: Diolah dari beberapa sumber, 2021*

Visualisasi data pada grafik di atas menggambarkan beberapa gejala permasalahan, antara lain: meningkatnya ketimpangan antar wilayah sebagaimana tercermin dari peningkatan indeks Williamson, pengangguran terbuka yang meningkat seiring dengan menurunnya PDRB per kapita. Sedangkan indikator lainnya meski mengalami peningkatan namun tidak cukup progresif untuk mengatasi permasalahan, seperti pada akses air minum yang baru mencapai 65%; akses sanitasi yang baru 72,32%; indeks indeks infrastruktur dasar yang baru sebesar 74,62%; indeks pembangunan gender yang baru mencapai 79%, indeks pendidikan yang baru mencapai 0,55; dan indeks kesehatan yang baru mencapai sebesar 0,73.

## 1.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang digunakan dalam membiayai belanja daerah. PAD memainkan peranan penting dalam pembiayaan dan merupakan salah satu indikator kemandirian daerah. PAD sendiri sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak selama Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 lebih banyak disumbang oleh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (khususnya pendapatan BLUD) dan Pajak Daerah.

**Grafik**
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**
**Tahun 2016 - 2020**

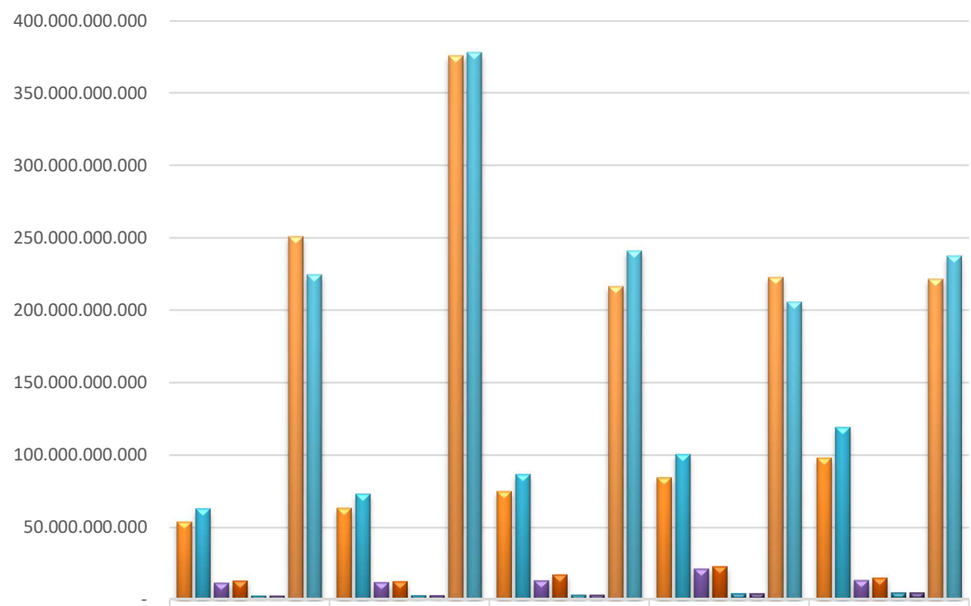


| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Pajak Daerah | 54.185.808.000 | 63.562.995.000 | 75.116.364.000 | 84.625.000.000 | 98.201.500.000 |
| Realisasi Pajak Daerah | 63.133.114.649 | 73.390.964.885 | 86.974.239.495 | 100.736.135.403 | 119.245.503.318 |
| Target Retribusi Daerah | 11.917.919.640 | 12.463.373.350 | 13.600.992.100 | 21.622.621.100 | 13.815.387.665 |
| Realisasi Retribusi Daerah | 13.441.124.227 | 12.944.962.598 | 17.553.632.004 | 23.419.824.394 | 15.470.158.630 |
| Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | 3.116.528.198 | 3.195.024.706 | 3.699.552.600 | 4.629.530.800 | 5.231.517.851 |
| Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | 3.134.789.318 | 3.195.024.706 | 3.699.552.637 | 4.629.530.836 | 5.231.517.851 |
| Target Lain-lain PAD yang Sah | 250.946.958.737 | 375.721.958.031 | 216.495.683.460 | 222.889.396.800 | 221.692.851.959 |
| Realisasi Lain-lain PAD yang Sah | 224.776.903.744 | 377.943.585.992 | 241.136.002.738 | 205.937.246.267 | 237.557.224.320 |

*Sumber : LKPD Kabupaten Lebak, 2021*

Secara umum, dalam kurun waktu 2016-2020 Kabupaten Lebak masih bergantung pada Dana Perimbangan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat. Hal ini dibuktikan dari data target dan realisasi pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dimana kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah selalu di atas 58% yang sekaligus menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Lebak akan pendanaan dari pemerintah pusat masih tinggi sehingga upaya peningkatan kemampuan keuangan dan kemandirian daerah harus menjadi prioritas dan langkah strategis yang patut dikedepankan.

**Grafik**
**Kontribusi Realisasi Penerimaan per Jenis Pendapatan Daerah**
**Tahun 2016 – 2020**

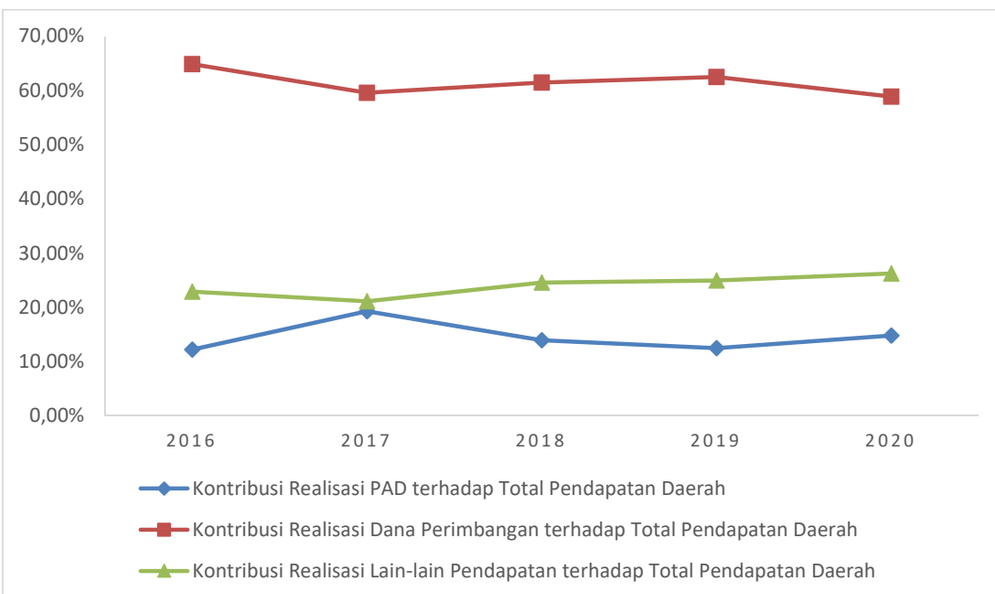


*Sumber : LKPD Kabupaten Lebak, 2021*

## II. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Lebak

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bersepakat mendorong transformasi digital di daerah guna mendukung pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP). Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi para pihak dalam melakukan kerja sama dan koordinasi untuk mendukung inovasi, percepatan, dan perluasan ETP, pengintegrasian pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital. Penandatanganan kesepakatan antara

Kementerian Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bank Indonesia dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Sebagai tindak lanjut atas komitmen dan kesepakatan tersebut dan sekaligus mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, maka melalui Keputusan Bupati Lebak Nomor 183/657/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Pemerintah Kabupaten Lebak, dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Keputusan Bupati ini juga semakin diperkuat dengan terbitnya Keputusan Presiden No.3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (Satgas P2DD). Adapun tujuan dari dibentuknya TP2DD tersebut adalah mempercepat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) serta mendorong perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang makin baik di Kabupaten Lebak.

Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah di Kabupaten Lebak sudah berjalan sejak Tahun 2012 yakni dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Bank bjb tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Untuk Menerima Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Online. MoU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dengan Bank Pembangunan Daerah pada Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Untuk Menerima Pembayaran Pajak Daerah Secara Online. Dengan PKS ini maka Bendahara Penerimaan di Bapenda tidak lagi menerima uang tunai dari Wajib Pajak melainkan langsung membayar ke RKUD. PKS ini terakhir diperbaharui Tahun 2019 dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 415/12/KB/BKS/2019 dan Nomor 7567/SPK/DIR/DJA/2019 tentang "Kerjasama Pemantauan dan Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik Melalui Bank Persepsi", dimana dalam Perjanjian Kerjasama ini sudah mengakomodir elektronifikasi, *Point of Sales System* serta *Intelligent Tapping System*.

Secara umum, gambaran perkembangan ETP di Pemerintah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

1. Untuk penerimaan sembilan jenis Pajak Daerah, yang dikelola Pemerintah Kabupaten Lebak, seluruhnya sudah dilakukan secara non tunai melalui kanal baik kanal digital seperti *mobile banking*, transfer antar bank, *QRIS* maupun *e-commerce* (*go pay*), dan kanal semi digital yakni pembayaran melalui teller bank dan agen bank.

**Tabel**

**Gambaran Transaksi Pajak Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021**

**(Sampai Dengan Bulan Desember 2021)**

| URAIAN | TOTAL PENDAPATAN | TUNAI | TELLER | EDC | QRIS | ATM | M-BANKING | E-COMMERCE | KANAL LAIN | TOTAL KANAL DIGITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajak Hotel | 366.268.003 | - | 366.156.503 | - | - | - | 111.500 | - | - | 111.500 |
| | | | 99,97% | 0% | 0% | 0% | 0,03% | 0% | 0% | 0,03% |
| Pajak Restoran | 5.310.671.386 | - | 4.548.813.703 | - | - | 400.000 | 761.457.683 | - | - | 761.857.683 |
| | | | 85,65% | 0% | 0% | 0,01% | 16,74% | 0% | 0% | 14,35% |
| Pajak Hiburan | 48.343.993 | - | 48.343.993 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 100,00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pajak Reklame | 1.057.464.283 | - | 1.018.780.868 | - | - | - | 38.683.415 | - | - | 38.683.415 |
| | | | 96,34% | 0% | 0% | 0% | 3,66% | 0% | 0% | 3,66% |
| Pajak Penerangan Jalan | 18.970.648.682 | - | 18.970.648.682 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 100,00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pajak Parkir | 563.946.900 | - | 563.946.900 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 100,00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pajak Air Tanah | 591.087.561 | - | 591.087.561 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 100,00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pajak Sarang Burung Walet | 13.929.600 | - | 13.929.600 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 100,00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pajak Mineral Bukan Logam | 39.760.941.996 | - | 39.760.941.996 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 100,00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pajak PBB | 26.900.926.342 | - | 25.678.723.313 | 469.125.387 | 7.940.475 | 73.577.220 | 668.083.228 | 66.708 | 3.410.011 | 1.222.203.029 |
| | | | 95,46% | 1,74% | 0,03% | 0,27% | 2,48% | 0,00% | 0,01% | 4,54% |
| Pajak BPHTB | 63.838.409.310 | - | 31.979.345.042 | - | - | - | 31.859.064.268 | - | - | 31.859.064.268 |
| | | | 50,09% | 0% | 0% | 0% | 49,91% | 0% | 0% | 49,91% |
| | **157.422.638.056** | | **123.540.718.171** | **469.125.387** | **7.940.475** | **73.977.220** | **33.327.400.094** | **66.708** | **3.410.011** | **33.881.919.895** |
| | | | **78,48%** | **0,30%** | **0,01%** | **0,05%** | **21,17%** | **0,00%** | **0,00%** | **21,52%** |

*Sumber : Bapenda Kabupaten Lebak*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasai penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 sampai dengan bulan Desember sudah 100% dilakukan secara non tunai. Namun dari persentase tersebut, penerimaan non tunai melalui Kanal Semi Digital Teller mencapai 78,48%, dan transaksi melalui Kanal Digital mencapai 21,52% dengan rincian : EDC 0,30%, QRIS 0,01%, ATM 0,05%, M-Banking 21,17%, *e-Commerce* 0%.

Untuk Penerimaan Retribusi Daerah, sebagian sudah dilakukan secara non tunai yakni melalui kanal Semi Digital (teller) maupun QRIS, *Mobile Banking*, EDC maupun ATM. Walaupun saat ini seluruh jenis Retribusi sudah dibuatkan QRIS Statis oleh Bank bjb yang bisa dimanfaatkan untuk pembayaran secara digital serta sistem aplikasi penerimaan Retribusi, namun belum optimal dimanfaatkan sebagai kanal pembayaran dan sedang dalam proses sosialisasi secara intensif kepada wajib Retribusi.

**Tabel**

**Gambaran Transaksi Retribusi Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021**

**(Sampai Dengan Bulan Oktober)**

| | | | | KANAL DIGITAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL PENDAPATAN | TUNAI | TELLER | EDC | QRIS | ATM | M-BANKING | E-COMMERCE | KANAL LAIN | TOTAL KANAL DIGITAL |
| **INAS KESEHATAN** | | | | | | | | | | |
| etribusi Pelayanan Kesehatan | 298.125.000,00 | - | 298.125.000<br>100,00% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% |
| **INAS PEKERJAAN UMUM DAN PR** | | | | | | | | | | |
| etribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/QC | 200.187.182,00 | - | 200.187.182<br>100,00% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% |
| etribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ALBER | 273.190.000,00 | - | 187.870.000<br>68,77% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | 85.320.000,00<br>31,23% | -<br>0% | -<br>0% | 85.320.000<br>31,23% |
| etribusi Izin Mendirikan Bangunan | 6.139.844.390,00 | - | 6.139.844.390<br>100,00% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% |
| etribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 332.642.900,00 | - | 332.642.900<br>100,00% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% |
| **INAS PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | |
| etribusi Pelayan Parkir Tepi Jalan Umum | 245.020.000 | 119.952.000<br>48,96% | 79.968.000<br>32,64% | -<br>0% | -<br>0% | 45.100.000<br>18,41% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | 45.100.000<br>18,41% |
| etribusi Pengujian Kendaraan Bermotor/PKB | 970.985.000 | - | 182.018.780<br>18,75% | 520.959.000<br>53,65% | 48.364.000<br>4,98% | 62.511.000<br>6,44% | 157.132.220<br>16,18% | -<br>0,00% | -<br>0,00% | 788.966.220<br>81,25% |
| etribusi Terminal | 286.619.000 | 47.252.520<br>16,49% | 149.628.480<br>52,20% | -<br>0% | -<br>0% | 89.738.000<br>31,31% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | 89.738.000<br>31,31% |
| etribusi Izin Trayek | 21.650.000,00 | - | 21.650.000<br>100,00% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% |
| **INAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | |
| estribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 423.082.700 | 100.527.888<br>23,76% | 311.336.112<br>73,59% | 4.216.500<br>1,00% | 2.200<br>0,00% | 7.000.000<br>1,65% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | 11.218.700<br>2,65% |
| etribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 23.400.500 | - | 3.400.000<br>14,53% | -<br>0% | 20.000.500<br>85,47% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | 20.000.500<br>85,47% |
| etribusi Pemakaian laboratorium Lingkungan Hid | 468.157.728 | - | 410.934.028<br>0,88 | -<br>0% | 2.000<br>0,00% | 27.384.300<br>5,85% | 29.837.400<br>6,37% | -<br>0% | - | 57.223.700<br>12,22% |
| estribusi MCK | 29.700.000 | 7.128.000<br>24% | 22.572.000<br>76,00% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% | -<br>0% |

*Sumber : Bapenda Kabupaten Lebak*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021 sampai dengan bulan Desember yang masih diterima secara tunai baru mencapai 14,44%, diantaranya adalah Retribusi Parkir, Retribusi Pasar, Retribusi Terminal, Retribusi Persampahan, Retribusi Pelelangan ikan, namun saat ini masih dalam tahap proses sosialisasi kepada masyarakat. Jenis retribusi lainnya sudah berjalan secara semi non tunai, baik melalui teller sebesar 76,90% dan melalui Kanal Digital

sebanyak 8,65% dengan rincian EDC 3,61%, QRIS 0,87%, ATM 2,23%, dan *M-Banking* 1,95%.

Untuk Transaksi Belanja Daerah sejak Tahun 2019 sudah seluruhnya dilakukan secara non tunai melalui *Internet Banking Corporate*, baik belanja daerah di Perangkat Daerah, Kecamatan, sampai dengan Desa.

SP2D sudah berjalan secara *online* dan terintegrasi dengan bank RKUD Online. Data Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang sudah terealisasi dengan SP2D Online adalah sebanyak 14.183 transaksi dengan nilai sebesar Rp. 1.698.732.430.166,33. Sedangkan data jumlah SP2D Online tahun 2021 yang sudah terealisasi sampai dengan bulan November adalah sebanyak 10.466 transaksi dengan nilai sebesar Rp. 1.346.721.184.465,70

## III. ASSESMEN EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH

### 1. Jaringan Komunikasi (Internet)

Secara umum Kabupaten Lebak masih dihadapkan pada kendala ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang belum cukup memadai, yang berimplikasi pula terhadap tingkat usabilitas teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Karenanya, tantangan dan permasalahan utama yang dihadapi pada urusan ini adalah upaya mengoptimalkan layanan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baik untuk kepentingan internal pemerintahan daerah maupun untuk kepentingan mengoptimalkan pelayanan publik. Kedua hal ini menjadi kebutuhan yang sangat urgen di tengah situasi pandemi yang menuntut kepatuhan pada protokol kesehatan yang salah satunya dalam bentuk pembatasan interaksi antarpersona secara langsung, sehingga kebutuhan terhadap jenis pelayanan digital menjadi sangat mendesak.

Meski penerapan SPBE di Kabupaten Lebak telah berpredikat sangat baik degan skor sebesar 3,52 berdasarkan evaluasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui situs portal pemeringkatan SPBE (spbe.go.id), namun tantangan untuk melakukan transformasi digital masih sangat besar sebagaimana tercermin dari

beberapa kondisi faktual antara lain: baru sekitar 49,01 % penduduk usia 5 tahun ke atas di Kabupaten Lebak yang memiliki telpon seluler; hanya 5,27 % penduduk usia dimaksud yang menggunakan komputer, yang berasal dari sekitar 5,29 % rumah tangga yang memiliki fasilitas komputer dan/ laptop di rumahnya; baru sekitar 28,72 % penduduk yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir, serta kondisi hampir seluruh rumah tangga yang tidak terkoneksi dengan jaringan telepon PSTN (Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, 2019). Kondisi ini diperburuk dengan kondisi infrastruktur TIK yang belum memadai, dimana secara faktual hampir seluruh kecamatan masih memiliki desa yang tidak terjangkau sinyal seluler.

### 1.1. Cakupan Jaringan Dan Internet

Implementasi konsep '*Smart City*' dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Lebak sudah tercermin dari program yang dimiliki beberapa dinas seperti Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dengan *Lebak Smart City*, Sekretariat Daerah bagian Administrasi Pembangunan dengan *Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pengandalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan *Dulur Desa*, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan *Sistem Informasi Kepegawaian*, Dinas Penanaman Modal dengan *Sistem Informasi Manajemen Perijinan Online*, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan *Sistem Tata Ruang*-nya (SITARU), Badan Pendapatan Daerah dengan *Lebak Smart Tax*, Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan *Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah* (ATISISBADA), hingga pemanfaatan aplikasi yang terintegrasi dalam bidang perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban yang digunakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bersama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang juga telah terintegrasi dengan perbankan seperti SIMR@L dan SIPD.

Untuk mendukung *Smart City* Kabupaten Lebak, maka kemandirian dalam pengelolaan infrastruktur jaringan dan internet yang berkualitas

baik merupakan hal yang mutlak. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan berbagai *provider* secara bertahap terus membangun jaringan fiber optik untuk menghubungkan instansi pemerintahan, kecaman dan desa sebagai sarana komunikasi data.

Seluruh wilayah Kabupaten Lebak sebesar 80% sudah terjangkau jaringan 4G, 90% 3G, 95% 2G dan 5% blankspot. Untuk saat ini OPD Pemerintah Kabupaten Lebak sudah terhubung ke internet dengan jaringan fiber optik yang dikelola secara mandiri oleh OPD terkait yang dimonitoring oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak. Selain itu, area publik di sekitar OPD sudah disediakan jaringan internet gratis (*free-Wifi*) yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

### 1.2. Kecepatan

Guna menjamin kelancaran layanan berbasis internet maka dibutuhkan bandwidth yang memadai. Saat ini total bandwidth rata-rata setiap instansi pemerintahan, kecamatan dan desa sebesar 100 mbps dengan jumlah pengguna kurang lebih 407 user.

### 1.3. Provider

Untuk memenuhi kebutuhan bandwith yang ada, Pemerintah kabupaten Lebak melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik dan Persandian saat ini bekerjasama dengan 3 provider internet yakni dari PT. Telkom Indonesia Tbk, PT. Trans Indonesia Superkoridor, PT. Awinet Global Mandiri dengan kuota rata-rata 100 mbps per instansi. Hal ini dilakukan agar apabila salah satu penyedia mengalami gangguan maka masih ada cadangan atau *backup* dari provider yang lain sehingga tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Infrastruktur Perbankan

### 2.1. Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah

Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki satu bank pengelola rekening kas umum daerah, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. merupakan bank umum yang sahamnya dimiliki oleh

pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten, dengan komposisi kepemilikan Saham bank bjb milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Posisi 31 Desember 2021 yakni sebesar 0,38%%.

### 2.2. Buku Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 02 tanggal 01 September 2020 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0383612 tanggal 08 September 2020 serta perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 10 tanggal 06 April 2021 yang dibuat oleh notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat tertanggal 22-04-2021 Nomor AHU-AH.01.03-0255714.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Bank Umum telah mengubah pengelompokkan Bank Umum dari semula BUKU menjadi KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti) Bank bjb saat ini masuk dalam KBMI II (modal inti 6 s.d 14 Triliun).

### 2.3. Produk Layanan Non Tunai Yang Dimiliki Bank RKUD

Bank Pengelola RKUD bank bjb memiliki berbagai produk layanan non-tunai di antaranya:

- ✓ Bjb NET adalah layanan bank yang memanfaatkan teknologi dimana nasabah dapat melakukan transaksi secara mobile berbasis internet.
- ✓ Bjb SMS adalah layanan sms banking yang memanfaatkan jaringan Short Message Service atau SMS dalam penggunaannya dimana dapat memudahkan nasabah bertransaksi tanpa melalui ATM maupun teller.
- ✓ Bjb Digi adalah aplikasi mobile berbasis sistem operasi android dan IOS yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai macam layanan perbankan elektronik dan digital milik bank bjb.
- ✓ *Internet Banking Corporate* aplikasi internet banking berbasis web yang diperuntukan bagi nasabah non perotangan dimana dapat melakukant transaksi keuangan kapan saja dengan cepat, mudah dan aman
- ✓ *Payment Point* merupakan layanan pembayaran tagihan secara online real time sehingga proses rekonsiliasi baik data dan dana bisa lebih cepat dan akurat.
- ✓ *Cash Recycling Machine* (CRM) adalah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang dapat dipergunakan oleh nasabah bank bjb untuk melakukan penarikan rekening sendiri serta penyetoran ke rekening sendiri atau ke rekening orang lain. Selain penyetoran uang tunai, CRM juga berfungsi untuk melakukan transfer, pembayaran, dan pembelian.
- ✓ Mesin ATM Bank bjb adalah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang dipergunakan untuk melakukan berbagai transaksi seperti transaksi penarikan, pembayaran, pembelian, transfer ke seluruh rekening bank bjb, dan transfer ke rekening yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama, jaringan Prima,
- ✓ Mobil Kas Keliling Bank bjb adalah layanan untuk menjangkau nasabah hingga ke pelosok dan memberikan layanan yang mudah, cepat, serta aman.
- ✓ Agen Laku Pandai adalah layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif yaitu program OJK untuk penyediaan layanan perbanka atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank)dan didukung oleh

sarana teknologi informasi.

- ✓ QRIS (QR Code Indonesia Standard) adalah layanan transaksi non tunai dalam bentuk QR standar dari Bank Indonesia yang ada dalam Aplikasi bjb Digi. Bank bjb dapat digunakan untuk sarana pembayaran dari seluruh aplikasi pembayaran QR di Indonesia yang berlogo QRIS GPN yangditerbitkan oleh perbankan/fintech.
- ✓ *Transfer for Payment* adalah layanan Bank bjb dimana transaksi transfer dilakukan dengan menggunakan rekening Virtual Account (VA).
- ✓ *Payroll Package* adalah layanan pembayaran gaji dimana pembayaran dilaksanakan secara pemindahbukuan dari rekening pemberi gaji ke rekening penerima gaji. Payroll Package dapat dilayani di seluruh kantor cabang Bank bjb..
- ✓ SP2D Online : Integrasi sistem keuangan Pemda dengan sistem Bank yang memungkinkan pencairan SP2D secara online antar-sistem.

## 2.4. Jumlah Infrastruktur Bank Pengelola RKUD

Perkembangan infrastruktur jaringan kantor Bank Bjb Tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut ini:

**Tabel**

**Perkembangan Jaringan Kantor Bank Bjb Tahun 2016-2021**

| Jenis Kantor/*Office Type* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Pusat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kantor Cabang | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Kantor Cabang Pembantu Type A | 311 | 312 | 314 | 316 | 315 | 305 |
| Kantor Cabang Pembantu Type B (Kantor Kas) | 337 | 342 | 349 | 351 | 346 | 328 |
| Kantor Cabang Pembantu Type C (*Payment Point*) | 142 | 156 | 171 | 171 | 213 | 184 |
| Kantor Cabang Pembantu Type C (Mobil Kas) | 16 | 11 | 34 | 36 | 51 | 57 |
| ATM | 1216 | 1404 | 1526 | 1734 | 1743 | 1750 |
| CDM | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 |
| EDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 |
| **Total Jaringan Kantor** | **2087** | **2292** | **2463** | **2677** | **3755** | **3730** |

*Sumber : PT. Bank Jabar Banten*

### 2.5. Kerjasama Yang Dimiliki Bank RKUD Dalam Layanan Non Tunai

Bank bjb memiliki kerjasama melalui perjanjian kerjasama pengelolaan Keuangan Daerah dan Perjanjian Kerjasama tentang penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Selain itu Bank bjb juga tergabung sebagai anggota tim TP2DD Kabupaten Lebak.

Perjalanan Non Tunai Kabupaten Lebak dimulai sejak Tahun 2017 diawali dengan *payroll* gaji secara non tunai melalui pemindahbukuan dan SP2D Online yang kemudian disusul dengan seluruh belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lebak. Tahun 2018 dilakukan pembayaran retribusi secara non tunai pada beberapa layanan publik seperti Parkir, Pasar, Uji Kendaraan dengan menggunakan *EDC* dan *Virtual Account* serta integrasi sistem Pajak Daerah yang ada di Bapenda Kabupaten Lebak (*Sismiop, e-BPHTB, Simpal*) dengan bank bjb sehingga pembayaran Pajak Daerah dapat dilakukan secara online (PBB, BPHTB, dan Pajak Daerah lainnya), Pada Tahun 2020 dilakukan integrasi sistem Retribusi Daerah yang ada di Bapenda Kabupaten Lebak dengan bank bjb sehingga masyarakat dapat melakukan Pembayaran Retribusi secara non Tunai di berbagai kanal (*M-Banking, ATM, Qris, EDC*). Dan pada Tahun 2021 seluruh pajak & retribusi sudah terpasang *QRIS* sebagai alat pembayaran non Tunai dan seluruhya telah terintegrasi dengan bank.

Bank bjb juga menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat memperluas jangkauan pembayaran digital, seperti *fintech Link Aja*, dan *e-commerce Tokopedia* dan *minimarket Indomart*. Dengan demikian, pembayaran pendapatan daerah dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga memungkinkan wajib pajak dan wajib retribusi yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Lebak sekalipun tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus hadir langsung ke kantor layanan Bank.

## 3. Lingkungan Strategis

### 3.1. Arah Kebijakan Pemda Dalam Mendukung Digitalisasi Daerah Dan Pemulihan Ekonomi Daerah

Pemerintah Kabupaten Lebak mendukung penuh proses digitalisasi daerah khususnya bagi pemulihan ekonomi daerah. Hal ini dilakukan dengan merasionalisasi Anggaran Belanja Daerah dengan mengarahkan belanja daerah untuk penanganan COVID-19.

Disamping itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dimana beberapa kebijakan diambil untuk mendukung proses transformasi digitalisasi dan pemulihan ekonomi daerah antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Lebak berupaya membantu meringankan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Lebak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak. Pemberian keringanan dan penghapusan Sanksi Administratif, berupa bunga yang dikenakan akibat ketetapan Pajak Terutang tidak dibayar atau belum dibayar atas pajak tahun tersebut untuk meringankan beban masyarakat dalam menunaikan kewajiban PBB-P2.
2. Melalui Surat Edaran Bupati Lebak Nomor : 115/10785/BPDKD tentang Perpanjangan Penetapan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Terutang untuk PBB-P2 Tahun 2021 sebagai Dampak Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak mengambil kebijakan sebagai bentuk keprihatinan serta kepedulian pemerintah atas dampak penurunan perekonomian akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.
3. Melalui Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Bank bjb, dibangun Aplikasi *On Boarding* yang berbasis android untuk Pajak Daerah yakni aplikasi *Pajak Digital Etepde* (Pagi Lebak) yakni aplikasi yang dibangun untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kewajiban pajaknya, mendapatkan informasi terkait pajak daerah dan memberikan kemudahan akses pembayaran pajak karena aplikasi ini akan diitegrasikan dengan sistem yang ada di bank bjb dan juga akan terintegrasi dengan

aplikasi *Pro Lebak Plus*. Kedepannya aplikasi ini akan ditransformasi kembali dengan mengakomodir Pendapatan Retribusi Daerah.

4. Untuk membantu UMKM yang ada di Kabupaten Lebak, atas gagasan Bupati Lebak maka dibangun aplikasi "Paon Lebak" yakni suatu aplikasi Sistem jual beli *online* dan pesan antar antara penjual (pelaku UMKM) dan pembeli berbasis *mobile* dan *website* di Kabupaten Lebak. Dengan *Paon Lebak*, maka diupayakan penjualan produk UMKM yang untuk saat ini difokuskan melibatkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai User/pelanggan sehingga hal ini diyakini akan mampu membantu UMKM khususnya yang bergerak di bidang kuliner untuk bisa *survive* dan kembali eksis dalam masa pandemi ini. Dengan "Paon Lebak" ini UMKM menuju market era digital.
5. Sebagai event tahunan, Pemerintah Kabupaten Lebak pada akhir Tahun 2021 menggelar acara Festival yang mana pada tahun ini memasuki event ke-14 dengan mengusung tema *"Digital"*. Tema ini menjadi spirit bahwa kreatifitas adalah kekuatan untuk mengatasi kesulitan, terutama dalam krisis multidimensi pandemi COVID-19 yang berdampak pada terpuruknya perekonomian. Program event ke-14 ini dikemas menjadi ruang kreativitas bagi kreator dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai program padat karya berbasis seni budaya, sehingga diharapkan mampu memberikan motivasi agar tetap berkreatifitas di masa pandemi.

### 3.2. Keberadaan Regulasi Pendukung ETP dan *e-Government*

Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk melaksanakan elektronifikasi, dimana sudah dimulai sejak Tahun 2014 yakni dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Lebak Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (*e-Government*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang didukung dengan beberapa regulasi terkait elektronifikasi dan *e-Government* lain, seperti :

1. Instruksi Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagai tindaklanjut dari amanat pemerintah pusat melalui SE Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ

tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai.

2. Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 970/Kep.237-BAPENDA/2021 tanggal 31 Maret 2021 Perihal Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagai tindaklanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
3. Surat Edaran Nomor : 970/664-BAPENDA/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Perihal Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Lebak untuk mendorong kenaikan IETPD Kabupaten Lebak.
4. Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir Secara Online.
5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Secara Online.
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik.

### 3.3. Tingkat Literasi Non Tunai Dan Digital Masyarakat

Di tengah pandemi, transaksi pembayaran secara non tunai menjadi pilihan masyarakat Kabupaten Lebak. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan protokol kesehatan, tanpa adanya kontak langsung dan mencegah penyebaran COVID-19.

Berdasarkan data dari bank bjb transaksi secara digital per Desember 2021 pengguna *m-banking* sebanyak 16.757 dengan *utiliasi* sebanyak 9.189 transaksi, sementara jumlah *merchant QRIS* sebanyak 12.060 dengan *utilisasi* sebanyak 1.373 transaksi, jumlah transaksi menggunakan QRIS belum sebanding dengan jumlah *merchant* yang ada, hal ini karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya transaksi digital menggunakan QRIS dan sosialisasi belum menyeluruh.

Dari data tersebut di atas mengindikasikan bahwa tingkat literasi non tunai di Kabupaten Lebak belum cukup baik sehingga edukasi masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non tunai melalui kanal digital seperti QRIS perlu dilakukan sosialisasi secara massif dan berkesinambungan.

**Tabel**
**Capaian Merchant bank pengelola RKUD Tahun 2021**

| Nama Bank | Realisasi Merchant |
|---|---|
| Bank bjb Cabang Rangkasbitung | 14.286 |

*Sumber : PT. Bank Jabar Banten*

## IV. KENDALA DAN PERMASALAHAN

Peta Permasalahan ETPD diperoleh dari proses indentifikasi dan analisis hambatan atau kendala pelaksanaan ETPD baik secara umum maupun setiap jenis pendapatan daerah dan belanja daerah. Identifikasi dan analisis dilakukan terhadap hambatan atau kendala yang dijumpai pada Peta Transaksi yang telah dibuat sebelumnya. Permasalahan pelaksanaan ETPD di Kabupaten Lebak dapat dilihat baik dari sisi Kanal Pembayaran maupun Per Jenis Penerimaan.

Adapun Permasalahan pelaksanaan ETPD dari sisi Kanal Pembayaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel**
**Peta Permasalahan ETPD Kabupaten Lebak dari Sisi Kanal Pembayaran**

| No | Jenis Kanal | Pemerintah Daerah | Masyarakat | Bank bjb | Infrastruktur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **QRIS** | • Untuk 8 jenis Pajak Daerah sudah memiliki QRIS sebagai sarana pembayaran, tetapi sosialisasi kepada wajib pajak masih belum maksimal<br>• Untuk Retribusi Daerah sudah memiliki QRIS sebagai sarana pembayaran, namun belum digunakan secara optimal, dan sosialisasi/edu kasi kepada masyarakat masih kurang optimall | • Masyarakat belum banyak yang memanfaatkan QRIS sebagai sarana pembayaran<br>• Masih menyukai membawa uang tunai<br>• Belum atau tidak memiliki *mobile banking* dan atau *e-wallet*<br>• Keengganan membayar secara digital karena nilai rupiah terlalu kecil<br>• Masih banyak masyarakat yang belum memiliki handphone android | • QRIS masih statis, dan belum terintegrasi dengan sistem Bapenda sehingga tidak dapat membaca data wajib pajak apabila melakukan pembayaran melalui QRIS | • Jangkauan internet gratis terutama di OPD dan sarana publik belum optimal<br>• QRIS belum *Dinamic* sehingga belum terintegrasi dengan sistem Bapenda, saat ini sedang proses pembuatan Qris *Dinamic* oleh vendor dan bjb Pusat |
| 2 | **ATM** | • ATM bank bjb tidak tersedia di Kantor Pelayanan Pajak Bapenda. | • Keengganan untuk memanfaatkan ATM karena lebih memilih datang langsung ke Teller untuk mendapatkan bukti pembayaran dengan stempel bank | • Perlu biaya yang cukup besar untuk menambah jumlah mesin ATM apabila tidak diimbangi oleh transaksi yang banyak | • Penempatan ATM harus ada standarisasi baik dari aspek tempat, banyaknya transaksi, dll |

| No | Jenis Kanal | Pemerintah Daerah | Masyarakat | Bank bjb | Infrastruktur |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Mobile Banking** | • Kode bayar belum dapat ditransaksikan di bank lain sehingga agak menyulitkan bagi wajib pajak yang memiliki rekening bank lain | • Masyarakat belum seluruhnya memiliki *mobile banking*<br>• Banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan mobile banking walaupun memiliki simpanan di bank bjb<br>• Masih banyak masyarakat y ang belum memiliki HP android | • Nasabah yang memiliki mbanking per Desember 2021 sebanyak 14.286, namun masih banyak yang tidak memanfaatkan untuk membayar pajak daerah secara *online* | • Menyiapkan layanan khusus aktivasi *mobile banking* |
| 4 | **e-Commerce** | • Kerjasama bank bjb baru dengan Tokopedia, LinkAja, sehingga masih banyak *e-commerce* lain yang potensial belum dilakukan kerjasama<br>• *e-Commerce* baru dapat memfasilitasi setoran PBB saja | • Layanan penerimaan pajak daerah (PBB) melalui Tokopedia dan LinkAja sudah tersedia, namun belum digunakan secara optimal oleh masyarakat | • Penerimaan pajak daerah/ PBB melalui *e-commerce* tokopedia dan LinkAja | • Menambah kanal pembayaran lain seperti Kios Desa |
| 5 | **Digitial Lainnya** | • Kode bayar belum dapat digunakan oleh nasabah lbank lain<br>• Belum dianggarkan biaya untuk integrasi *Virtual Account* | • Banyak wajib pajak nasabah bank lain yang melakukan setoran melalui transfer antar bank tanpa kode bayar, sehingga kesulitan pada saat rekonsiliasi (tidak ada data nama dan jenis pajak) | • Belum integrasi *Virtual Account online* dengan sistem Bapenda | • Sedang dalam proses integrasi *Virtual Account* oleh vendor dan bjb Pusat |

*Sumber : Hasil Analisa*

Sedangkan untuk Permasalahan dari sisi Jenis Penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**
**Peta Permasalahan Dari Sisi Jenis Penerimaan**

| No | Jenis Penerimaan | Faktor Masalah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Pemda** | **Masyarakat** | **Bank bjb** | **Infrastruktur** |
| 1 | PBB-P2 | Pemanfaatan kanal digitital seperti *QRIS*, *e-commerce* dan kanal digital lainnya belum disosialisasikan secara maksimal | • Masyarakat banyak yang tidak memiliki handphone android<br>• Masih banyak Masyarakat Wajib Pajak yang belum memiliki atau tidak bisa menggunakan *mobile banking*, *QRIS* ataupun *e-commerce* walaupun fasilitas sudah disediakan | Belum optimalnya sosialisasi di masing-masing *teller* ataupun di agen bank untuk masyarakat untuk memanfaatkan *QRIS* maupun *mobile banking* | • Penyediaan jaringan *free wifi* pada area publik belum optimal<br>• Perluasan jaringan dan gerai ATM Bank bjb |
| 2 | Pajak Hotel | • Pemanfaatan kanal digitital seperti QRIS, ATM, *mobile banking* belum maksimal<br>• Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak | • Wajib Pajak banyak bukan nasabah Bank RKUD, dan banyak yg belum memiliki *mobile banking*<br>• Masih ada Wajib Pajak yang tidak mau atau kurang kooperatif saat akan dipasang alat *Tapping Box* | • Belum optimalnya Sosialisasi penggunaan QRIS, ATM, *Mobile banking* sebagai kanal pembayaran,<br>• *Teller* kurang menginformasi kan ke wajib Pajak untuk menggunakan QRIS | • Penyediaan jaringan *free wifi* pada area publik belum optimal<br>• Perluasan Jaringan dan gerai ATM Bank bjb |
| 3 | Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah | • Pemanfaatan kanal digitital seperti QRIS, ATM, *mobile banking* belum maksimal<br>• Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak | • Wajib Pajak banyak bukan nasabah Bank RKUD dan banyak yg belum memiliki *mobile banking*<br>• Masih ada Wajib Pajak yang tidak mau atau kurang kooperatif saat akan dipasang alat *Tapping Box* | • Belum optimalnya Sosialisasi untuk penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran<br>• Penggunaan *Virtual Account* sedang dalam proses integrasi | • Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal<br>• Perluasan Jaringan dan gerai ATM Bank bjb |
| 4 | Pajak Reklame | • Pemanfaatan kanal digitital seperti QRIS, ATM, *mobile banking* belum | • Wajib Pajak banyak bukan nasabah Bank RKUD, dan tidak memiliki *mobile* | • Belum optimalnya sosialisasi penggunaan QRIS sebagai | • Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | maksimal | *banking* | kanal pembayaran mengingat wajib pajak masih ada transfer dari bank lain dan dari kota lain | optimal |

| No | Jenis Penerimaan | Faktor Masalah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Pemda** | **Masyarakat** | **Bank bjb** | **Infrastruktur** |
| | | • Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak | • Banyak Wajib Pajak tidak berdomisili di Kabupaten Lebak dan hanya ada petugas yang mengurus pembayaran pajak, sehingga sulit berkomunikasi secara langsung | | • Perluasan Jaringan dan gerai ATM Bank bjb |
| 5 | BPHTB | • Pemanfaatan kanal digitital seperti QRIS, ATM, *mobile banking* belum maksimal<br>• Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak | • Masyarakat Wajib Pajak masih lebih suka dengan transaksi di *teller* karena mendapatkan bukti bayar di *teller*<br>• Masyarakat lebih memilih setor di Teller payment point Bapenda, karena dokumen harus divalidasi oleh Bapenda | • Belum optimalnya Sosialisasi untuk penggunaan QRIS, *mobile banking* dan ATM sebagai kanal pembayaran | • Penyediaan jaringan *free wifi* pada area publik belum optimal |
| 6 | Retribusi layanan kesehatan di Puskesmas | • Pemanfaatan kanal digitital seperti QRIS, ATM, mobile banking belum maksimal<br>• Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak | • Masyarakat yang berobat kebanyakan lansia, jadi tidak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank<br>• Masih banyak masyarakat yang belum memilki fasilitas mobile banking dan tidak bisa menggunakan fasilitas kanal digital seperti QRIS, | • Belum optimalnya sosialisasi ke masyarakat untuk pemanfaatan QRIS maupun mobile banking<br>• Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi mobile QRIS untuk pembayaran layanan kesehatan di Puskesmas | • Penyediaan jaringan *free wifi* pada area publik belum optimal<br>• Belum tersedianya jaringan *free wifi* di area Puskesmas |
| 7 | Pemakaian kekayaan daerah, IMB, dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | • Kode bayar hanya dapat dilakukan di bank bjb, bank lain belum intergrasi | • Masyarakat masih banyak yang belum memiliki android | • Belum adanya *virtual account online* utk mengakomodir wajib retribusi yang memiliki rekening bank lain (sedang di | • Penyediaan jaringan *free wifi* pada area publik belum optimal |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | • Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada wajib retribusi | | proses) | |

| No | Jenis Penerimaan | Faktor Masalah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Pemda** | **Masyarakat** | **Bank bjb** | **Infrastruktur** |
| 8 | Retribusi Pasar dan Transaksi jual beli di Pasar Tradisional | • Pemanfaatan kanal digitital seperti QRIS, ATM, *mobile banking* belum maksimal<br>• Kurangnya *sosialisasi* dan edukasi kepada wajib pajak | • Pedagang lebih memilih membayar retribusi pasar dengan tunai, karna nominal yang kecil<br>• Banyak pedagang yang tidak memiliki HP Android | • Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi kepada pedagang dan masyarakat untuk menggunakan QRIS maupun *mobile banking* sebagai kanal pembayaran | • *Penyediaan* jaringan *free wifi* pada areapasar belum optimal |
| | | | • Banyak pedagang yang tidak memiliki kuota utk bertransaksi dengan QRIS | | |
| 9 | Retribusi IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) | • Pemanfaatan kanal digital sebagai sarana pembayaran melalui QRIS belum maksimal<br>• Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepda masyarakat/ pemberi kerja untuk penggunaan QRIS atau kanal lainnya | • Tidak semua masyarakat/ pemberi Kerja memiliki rekening pada bank bjb<br>• Masih banyak masyarakat/ pemberi Kerja yang tidak memahami penggunaan QRIS | • Memerlukan konversi Kurs ke mata uang Rupiah saat pembayaran Retribusi<br>• Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat/ pemberi Kerja untuk penggunaan QRIS | • Penyediaan jaringan *free wifi* pada areapublik belum optimal |
| 10 | Retribusi Rumah Potong Hewan | • Pemanfaatan kanal digitital seperti QRIS, *e-commerce* dan kanal digital lainnya belum maksimal<br>• Kurangnya sosialisasi dari petugas jaga kepada wajib retribusi untuk membayar | • Masyarakat enggan untuk membayar menggunakan QRIS, padahal sudah difasilitasi QRIS | • Belum optimalnya Sosialisasi di masing masing teller ataupun di agen bank untuk mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan QRIS maupun *mobile banking* | • Penyediaan jaringan *free wifi* pada areapublik belum optimal |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | menggunakan QRIS | | | |

| No | Jenis Penerimaan | Faktor Masalah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemda | Masyarakat | Bank bjb | Infrastruktur |
| 11 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | • Pemanfaatan kanal digital QRIS dan ATM sudah cukup optimal, sudah 100% untuk retribusi tera ulang | • Wajib tera khususnya pedagang kecil tidak memiliki HP android dan belum memiliki *mobile banking*.<br>• Nilai retribusi wajib tera di paasar tradisonal amat kecil.<br>• Wajib tera khususnya pedagang kecil di pasar yang datang menera timbangan kebanyakan buruhnya bukan pedagang bersangkutan. | • Sosialiasi QRIS masih kurang kepada masyarakat | • Penyediaan jaringan *free wifi* pada area publik belum optimal |
| 12 | Retribusi Parkir, Terminal, Izin Trayek dan PKB | • Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS dan kanal digital lainnya sudah maksimal<br>• Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari Dishub kepada kendaraan umum/angkot, elf dan pengguna parkir | • Masih banyak masyarakat/waji b retribusi yang belum paham cara melakukan pembayaran melalui QRIS, *mobile banking*, dan metode pembayaran digital lainnya<br>• Banyak yang setor PKB adalah driver dan suruhan, dan tidak memiliki HP android<br>• Nominal pembayaran parkir yang kecil Rp.1000-2.000 sehingga pengguna parkir enggan menggunakan *scan barcode* karna tidak ada kuota | • Belum optimalnya sosialisasi di masing-masing *teller* ataupun agen bank untuk mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan QRIS maupun *mobile banking* | • Penyediaan jaringan *free wifi* pada area publik belum optimal |

*Sumber : Hasil Analisa*

Melihat Peta Permasalahan diatas, maka sebagai pemecahan atas permasalahan yang timbul dari implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Lebak perlu dibuat Peta Penyelesaian

Permasalahan. Peta Penyelesaian Permasalahan ini dibuat sesuai dengan faktor masalah yang terdiri dari Faktor Pemerintah Daerah, Faktor Masyarakat, Faktor Bank RKUD dan juga Faktor Infrastruktur. Adapun Peta Penyelesaian Permasalahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel**
**Peta Penyelesaian Permasalahan**

| |
|---|
| **Faktor Pemerintah Daerah** |
| 1. Mengembangkan QRIS dinamis sebagai salah satu alternatif pembayaran dan mengembangkan kanal pembayaran digital lainnya seperti mobile dan internet banking.<br>2. Mengembangkan Virtual Account Online, agar wajib pajak pengguna seluruh bank dapat terintegrasi dengan Bapenda<br>3. Mengembangkan kerjasama dengan e-commerce lain dalam penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran<br>4. Mengarahkan para Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten LEBAK untuk menjadi role model dengan bertransaksi secara non tunai melalui kanal digital (QRIS dan mobile banking)<br>5. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait pembayaran pajak/retribusi secara non tunai baik melalui surat edaran maupun kegiatan-kegiatan promosi. |
| **Faktor Masyarakat** |
| 1. Melakukan sosialisasi secara terus menerus serta mengedukasi secara langsung maupun tidak langsung tentang tata cara penggunaan kanal digital seperti QRIS dan mobile banking (Media sosial, Website, RPKD, Video)<br>2. Mempercepat literasi digital kepada masyarakat luas untuk mendorong peningkatan transaksi keuangan secara digital<br>3. Melakukan sosialisasi kepada generasi milenial yang paham teknologi untuk menularkan dan mengedukasi generasi senior dalam pemanfaatan kanal digital |
| **Faktor Bank RKUD (bank bjb)** |
| 1. Teller dan Agen Bank secara terus menerus menginformasikan dan mengarahkan masyarakat untuk menggunakan kanal digital seperti QRIS dan Mobile Banking dalam bertransaksi.<br>2. Mengembangkan QRIS *Dynamic dan Virtual Account* yang integrasi dengan Pemda<br>3. Memberikan *reward* (bisa berupa poin) kepada masyarakat yang bertransaksi secara digital |
| **Faktor Infrastruktur** |
| 1. Perluasan Jangkauan Internet dan Penyediaan jaringan free wifi pada area publikdan pelayanan publik<br>2. Penambahan kuota bandwidth untuk mendukung digitalisasi daerah |

Dari gambaran peta penyelesaian permasalahan diatas, kolaborasi dari Pemerintah, Masyarakat dan Bank bjb selaku Bank RKUD Kabupaten LEBAK sangat diperlukan guna mempercepat proses elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

## V. RENCANA KERJA PERLUASAN ETP 2021-2025

### 1. Rencana Kerja Tahun 2021 - 2022

Rencana Kerja Tahun 2021-2022 disusun berdasarkan atas peta penyelesaian permasalahan yang mencakup tujuan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda yakni :

a. Meningkatnya Pemahaman Terkait Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP)
b. Meningkatnya Literasi Digital Dan Non tunai Masyarakat Kabupaten LEBAK
c. Meningkatnya Perluasan Dan Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemda
d. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
e. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE)

Adapun Rencana Kerja ETPD Kabupaten Lebak Tahun 2021-2022 dapat dilhat pada tabel di bawah ini :

**Tabel**
**Rencana Kerja ETPD Tahun 2021-2022**

| NO | URAIAN KEGIATAN | TAHAPAN/AKTIFITAS | TARGET | P I C |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelaksanaan Transaksi Non Tunai bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Lebak | Sosialisasi dan himbauan untuk bertransaksi secara non tunai baik dengan QRIS, *e-wallet*, *e-commerce*, *mobile banking* maupun kanal digital lainnya | 2021 : 100%<br>2022 : 100% | Seluruh OPD, bjb |
| | | Pembuatan kartu pegawai yang sekaligus berfungsi sebagai uang elektronik | 2021 : 0%<br>2022 : 100% | |
| | | Implementasi transaksi non tunai (baik belanja maupun pembayaran pajak dan retribusi) oleh pegawai pemerintah Kabupaten Lebak | 2021 : 20%<br>2022 : 80% | |
| 2 | Penggunaan QRIS, ATM dan *mobile banking* untuk pembayaran **Pajak** | Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada Wajib Pajak untuk memanfaatkan QRIS, ATM dan *mobile banking* | 2021 : 100%<br>2022 : 100% | Bapenda, bjb |
| | | Kerjasama dengan LinkAja, Bukalapak, dan Tokopedia untuk menerima pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Lebak | 2021 : 50%<br>2022 : 100% | |
| | | Integrasi QRIS Dinamis dan *Virtual Account Online* untuk Pajak | 2021 : 0%<br>2022 : 80% | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Penggunaan QRIS, ATM dan *mobile banking* oleh wajib pajak | 2021 : 10%<br>2022 : 80% | |

| NO | URAIAN KEGIATAN | TAHAPAN/AKTIFITAS | TARGET | P I C |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Penggunaan QRIS, ATM, EDC, maupun *mobile banking* untuk pembayaran **Retribusi** | Sosialisasi dan edukasi ke OPD dan wajib retribusi untuk memanfaatkan QRIS, ATM, maupun *mobile banking* | 2021 : 100%<br>2022 : 100% | OPD Pengelola Retribusi, Bapenda, bjb |
| | | Integrasi aplikasi web-R dan QRIS Dinamis untuk pembayaran retribusi | 2021 : 0%<br>2022 : 80% | |
| | | Pembangunan aplikasi M-POS untuk mempermudah pembayaran retribusi pasar | 2021 : 0%<br>2022 : 100% | |
| | | Pembangunan pojok digital di Pasar Rangkasbitung yang ditandai dengan launching "Pasar Jawara" | 2021 : 0%<br>2022 : 100% | |
| | | Pembangunan Pasar Digital di Desa Haurgajrug, Cipanas | 2021 : 0%<br>2022 : 100% | |
| | | Mengadakan bazar murah dengan transaksi menggunakan QRIS | 2021 : 0%<br>2022 : 100% | |
| | | Penggunaan QRIS, ATM dan *mobile banking* oleh wajib retribusi | 2021 : 5%<br>2022 : 30% | |
| 4 | Pembuatan atau Revisi Peraturan Bupati tentang Pelayanan Sistem Pajak dan Retribusi Daerah Secara Elektronik | Melakukan revisi atau pembuatan Peraturan Bupati untuk Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Secara Elektronik | 2022<br>1 Peraturan Bupati | Bapenda, Bagian Hukum |
| 5 | Perluasan Jangkuan Internet dan fasilitas *Free Wifi* | Memperluas cakupan jangkauan internet serta penambahan fasilitas *wifi* gratis di area publik dan pelayanan publik | 2021 : 15 area publik<br>2022 : 15 area publik | Dinas Kominfo |
| 6 | Pemanfaatan *internet banking corporate* (ibc) untuk mendukung transaksi belanja non tunai hingga skala desa | Pemanfaatan produk ibc dari bjb untuk transaksi belanja non tunai pada pemerintahan desa | 2021 : 80%<br>2022 : 100% | DPMD bjb |
| | | Integrasi siskeudes (aplikasi pengelolaan keuangan desa) dengan produk ibc dari bjb | 2021 : 0%<br>2022 : 100% | |
| 7 | Pemanfaatan *internet banking corporate (ibc)* untuk mendukung transaksi belanja non tunai pada satuan pendidikan dasar | Integrasi aplikasi keuangan satuan pendidikan dasar (SIBOS) dengan *internet banking corporate (ibc)* | 2021 : 0%<br>2022 : 80% | Dinas Pendidikan, bjb |

## 2. Rencana Kerja Tahun 2023-2025

Sebagai tindak lanjut atas Rencana Kerja Tahun 2021-2022, maka untuk keberlanjutan (*sustainable*) dan peningkatan perluasan digitaliasasi daerah, perlu disusun Rencana Kerja untuk Tahun 2023-2025. Rencana Kerja Tahun 2023-2025 ini berisi kegiatan lanjutan dari Rencana Kerja tahun sebelumnya dan terdapat juga kegiatan baru yang mana kegiatan ini sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lebak.

Adapun Rencana Kerja ETPD Tahun 2023-2025 Kabupaten Lebak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel**

**Rencana Kerja ETPD Tahun 2023-2025**

| NO | URAIAN KEGIATAN | TAHAPAN/AKTIFITAS | TARGET | | P I C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024-2025 | |
| 1 | Pemanfaatan Kanal Digital untuk pembayaran Pajak Daerah | Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui banner, spanduk, media sosial dan video | 100% | 2024 : 50%<br>2025 : 70% | Bank bjb dan Bapenda |
| | | Pemanfataan QRIS Dinamis yang terintegrasi *Virtual Account Online* untuk Pajak | 60% | 2024 : 70%<br>2025 : 80% | Bank bjb dan Bapenda |
| | | Pengembangan aplikasi SIMPAL untuk pemberian notifikasi kepada wajib pajak | 100% | | Bapenda |
| | | Optimalisasi pemanfaatan kanal digital untuk pembayaran pajak | 100% | | Bapenda |
| 2 | Pemanfaatan Kanal Digital untuk pembayaran Retribusi Daerah | Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui banner, spanduk, media sosial dan video | 100% | 2024 : 50%<br>2025 : 70% | Bank bjb dan OPD pengelola retribusi |
| | | Integrasi aplikasi web-R dan QRIS Dinamis untuk pembayaran retribusi | 100% | | |
| | | Penggunaan QRIS, ATM dan *mobile banking* oleh wajib retribusi | 40% | 2024 : 50%<br>2025 : 70% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pemanfaatan *internet banking corporate (ibc)* untuk mendukung transaksi belanja non tunai pada satuan pendidikan dasar | Integrasi aplikasi keuangan satuan pendidikan dasar (SIBOS) dengan *internet banking corporate (ibc)* | 100% | | Dinas Pendidikan, bjb |
| | | Pemanfaatan *internet banking corporate (ibc)* untuk mendukung transaksi belanja non tunai pada satuan pendidikan dasar | 25% | 2024 : 50%<br>2025 : 75% | |
| 4 | Perluasan Jangkuan Internet dan fasilitas *Free Wifi* | Memperluas cakupan jangkauan internet serta penambahan fasilitas *wifi* gratis di area publik dan pelayanan publik | 20 area publik | 2024 : 25 area publik<br>2025 : 25 area publik | Dinas Kominfo |

| NO | URAIAN KEGIATAN | TAHAPAN/AKTIFITAS | TARGET | | P I C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024-2025 | |
| 5 | Pemasyarakatan transaksi belanja non tunai (QRIS/*e-wallet*) melalui *event-event* daerah | Mendorong keterlibatan *private sector* dalam transaksi non tunai pada *event-event* daerah | 10 rekanan | 2024 : 20 rekanan<br>2025 : 40 rekanan | Seluruh OPD |
| | | Bazar/pasar murah dengan transaksi non tunai pada *event-event* daerah, seperti hari koperasi, HUT Lebak dsb | 2 event | 2024 : 3 event<br>2025 : 5 event | Seluruh OPD |

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023-2025 ini akan dilakukan evaluasi kembali pada saat penyusunan RPJMD berikutnya dan akan disesuaikan kembali agar tercipta keselarasan antara program dan kegiatan

Untuk melihat detail pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021-2022 akan ditampilkan detail kegiatan dalam Timeline seperti tertuang dalam tabel di bawah ini :

**Tabel**

**Timeline Rencana Kerja ETPD Tahun 2021-2022**

| NO | Rencana Pengembangan Kegiatan | Tahun 2021 | | | | | | | | | | | | Tahun 2022 | | | | | | | | | | | | PIC | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| **1** | **Pembentukan TP2DD dan Regulasi ETPD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembuatan SK Bupati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bapenda, BKAD, Bagian Hukum | SK Bupati Nomor 71 Tahun 2021, tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten LEBAK. |
| b | Pembentukan TP2DD Kabupaten Lebak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Pembuatan Peraturan Bupati ETPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Perbup Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik. |
| d | Pembuatan Keputusan Bupati tentang Roadmap ETPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kepbup Nomor : 900/Kep.423-BKAD/2022 tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah |
| **2** | **Koordinasi dan Rapat Teknis TP2DD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Rapat Teknis TP2DD (data dan evaluasi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TP2DD | Sudah dilakukan 9 kali Rapat Teknis dengan Tim P2DD |
| b | Asesmen BI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BI | Setiap Triwulan sebagai bahan evaluasi |
| c | High Level Meeting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TP2DD | Dilakukan pada saat pembentukan roadmap dan peta jalan serta rapat evaluasi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Rapat Pembahasan Draft Roadmap ETPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TP2DD | Seluruh Tim P2DD membuat rencana kerja dan rencana aksi yang akan dituangkan dalam kertas kerja penyusunan Roadmap ETPD |

| NO | Rencana Pengembangan Kegiatan | Tahun 2021 | | | | | | | | | | | | Tahun 2022 | | | | | | | | | | | | PIC | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| **3** | **Pengembangan Aplikasi Pendukung ETP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengaplikasian SIMPAL untuk pelayanan pajak daerah dan Web-R untuk retribusi daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bapenda, bjb | Aplikasi Pelayanan 5 Jenis Pajak Daerah yakni Pajak Hotel, Retoran, Hiburan, Air Tanah, Parkir yang terpadu dalam 1 aplikasi |
| b | Integrasi QRIS Dinamis dan *Virtual Account Online* untuk pembayaran pajak daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sedang dalam tahap pengajuan *virtual account* ke bjb pusat, sedangkan Bapenda dalam tahap penjajakan pengembangan integrasi aplikasi |
| c | Integrasi aplikasi web-R dan QRIS Dinamis untuk pembayaran retribusi daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPD terkait, bjb | |
| d | Penggunaan Aplikasi M-Pos untuk retribusi pasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bapenda, Disperindag, bjb | Aplikasi mobile pelayanan pajak daerah (Pendaftaran, Peremajaan data, informasi data pajak dan terintegrasi dengan pembayaran |
| e | Launching Pasar Digital Rangkasbitung, Cipanas dan Sampay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Launching pasar digital Sampay pada tanggal 7 Januari 2022, pasar digital Rangkasbitung pada tanggal 24 Maret 2022, dan pasar digital Cipanas pada tanggal 3 Juni 2022 |
| f | Integrasi siskeudes (aplikasi pengelolaan keuangan desa) dengan produk *internet banking* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DPMD, bjb | Aplikasi Siskeudes sudah terintegrasi per 2 Juni 2022 sehingga transaksi APBDes dapat dilakukan secara non tunai |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *corporate* dari bjb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g | Integrasi aplikasi keuangan satuan pendidikan dasar (SIBOS) dengan *internet banking corporate* (ibc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Disdik, bjb | Saat ini sedang dalam tahap uji coba pada 2 sekolah |
| **4** | **Pengembangan ETP menggunakan QRIS atau kanal digital lain** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Penggunaan QRIS, *e-wallet, e-commerce* dan *mobile banking* bagi ASN Kabupaten Lebak untuk belanja maupun pembayaran pajak & retribusi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Seluruh Perangkat Daerah | Menginstruksikan ASN Kabupaten Lebak untuk menggunakan QRIS, *e-wallet, e-commerce* dan *mobile banking* dalam setiap transaksi |
| **NO** | **Rencana Pengembangan Kegiatan** | **Tahun 2021** | | | | | | | | | | | | **Tahun 2022** | | | | | | | | | | | | **PIC** | **Keterangan** |
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | |
| b | Pembayaran melalui QRIS untuk layanan kesehatan pada Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinkes | Dilakukan bertahap dari Puskesmas yang paling siap secara sarana dan SDM |
| c | Pembayaran melalui QRIS untuk Layanan Kesehatan pada RSUD dan Labkesda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RSUD | Sosialisasi dan pedampingan kepada masyarakat tetap dilakukan untuk meningkatkan transaksi non tunai melalui kanal digital QRIS |
| d | Pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan QRIS Dinamis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bapenda | Pemasangan Tablet/PC pada pelayanan pajak di Bapenda untuk QRIS Dinamis |
| e | Pembayaran Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Tanah dan BPHTB) dengan QRIS Dinamis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bapenda | Pemasangan Tablet/PC pada pelayanan pajak di Bapenda untuk QRIS Dinamis |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | Pembayaran Retribusi Parkir dengan QRIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dishub | Untuk e-Money masih dalam tahap kajian akademis |
| g | Pembayaran Retribusi PBG dengan QRIS dan *mobile-banking* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas PUPR, PTSP | Dalam tahap persiapan |
| h | Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dishub | Sosialisasi dan pedampingan kepada masyarakat tetap dilakukan untuk meningkatkan transaksi non tunai melalui kanal digital QRIS |
| i | Pembayaran Retribusi Tera Ulang dengan QRIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Disperindag | Sosialisasi dan pedampingan kepada masyarakat tetap dilakukan untuk meningkatkan transaksi non tunai melalui kanal digital QRIS |
| j | Pembayaran Retribusi Pasar dengan QRIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Disperindag | Sosialisasi dan pedampingan kepada pedagang dilakukan untuk meningkatkan transaksi non tunai melalui kanal digital QRIS |
| k | Transaksi Jual Beli pada pada Pasar dengan QRIS Statis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Disperindag | Dari 1.043 Pedagang pada 2 pasar tradisional, sebanyak 523 pedagang sudah memiliki QRIS statis untuk bertransaksi |

| NO | Rencana Pengembangan Kegiatan | Tahun 2021 | | | | | | | | | | | | Tahun 2022 | | | | | | | | | | | | PIC | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| l | Pembayaran Parkir Elektronik pada pelataran Pasar Rangkasbitung dengan QRIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Disperindag | Diujicoba di Pasar Rangkasbitung yang sudah dipasang portal parkir elektronik |
| m | Pembayaran Retribusi RPH dengan QRIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pertanian | Diberikan pendampingan langsung bagi tukang jagal dan edukasi penggunaan QRIS |
| n | Kerjasama dengan LinkAja, Bukalapak, dan Tokopedia untuk menerima pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Lebak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bapenda, bjb | Kerjasama dengan tokopedia sejak 2019, bukalapak dan linkAja di 2022 |
| o | Mengadakan bazar murah dengan transaksi menggunakan QRIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pemkab Lebak, bjb | Telah dilakukan pada tanggal 22 April 2022 di Pasar Rangkasbitung serta 3 Juni 2022 di Pasar Cipanas. Selanjutnya direncanakan pada saat HUT Lebak |
| p | Pemanfaatan produk *internet banking corporate* (ibc) dari bjb untuk transaksi belanja non tunai pada pemerintahan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DPMD, bjb | Transaksi belanja APBDes telah menggunakan ibc sebagai sarana non tunai |
| **5** | **Edukasi dan Sosialisasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Sosialisasi dan edukasi penggunaan QRIS kepada pedagang dan UMKM untuk transaksi belanja non tunai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Disperindag, Dispar, Dinkop, bjb | Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik pedagang maupun UMKM untuk belanja menggunakan QRIS |
| b | Sosialisasi dan edukasi penggunaan QRIS Dinamis, ATM dan *mobile banking* untuk pembayaran Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bapenda | Dilakukan secara kontinyu dan massif untuk meningkatkan transaksi dengan kanal digital |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | Sosialisasi dan edukasi penggunaan QRIS, ATM dan *mobile banking* untuk pembayaran Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPD terkait | Dilakukan oleh masing-masing OPD pengelola retribusi secara terus menerus, serta edukasi dan pendampingan langsung kepada wajib retribusi |

**Tabel**

**Target ETPD Tahun 2021-2025**

| NO | URAIAN | JUMLAH WP/ TRANSAKSI | TARGET ETPD | | | | | | | | | | PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | Semi Digital | Digital | Semi Digital | Digital | Semi Digital | Digital | Semi Digital | Digital | Semi Digital | Digital | |
| | TARGET ETPD PAJAK DAERAH | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pajak Hotel | 43 WP | 98% | 2% | 93% | 7% | 85% | 15% | 80% | 20% | 75% | 25% | Bapenda |
| 2 | Pajak Restaurant | 165 WP | 90% | 10% | 80% | 20% | 70% | 30% | 60% | 40% | 50% | 50% | Bapenda |
| 3 | Pajak Hiburan | 17 WP | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Bapenda |
| 4 | Pajak Reklame | 115 WP | 97% | 3% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Bapenda |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan Umum | 1 WP | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Bapenda |
| 6 | Pajak Parkir | 6 WP | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Bapenda |
| 7 | Pajak Air Tanah | 110 WP | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Bapenda |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 33 WP | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Bapenda |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam | 45 WP | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Bapenda |
| 10 | PBB-P2 | 720.542 WP | 95% | 5% | 80% | 20% | 75% | 25% | 70% | 30% | 60% | 40% | Bapenda |
| 11 | BPHTB | 6.347 Trx | 90% | 10% | 80% | 20% | 70% | 30% | 60% | 40% | 50% | 50% | Bapenda |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TARGET ETPD RETRIBUSI DAERAH | | | | | | | | | | | | |
| A | RETRIBUSI JASA UMUM | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan Kesehatan | | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Dinas Kesehatan |
| 2 | Pelayanan Persampahan/Kebersihan | | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Dinas LH |
| 3 | Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Dishub |
| 4 | Pengujian Kendaraan Bermotor | | 30% | 70% | 25% | 75% | 20% | 80% | 15% | 85% | 10% | 90% | Dishub |
| 5 | Pelayanan Tera/Tera Ulang | | 10% | 90% | 5% | 95% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | Disperindag |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pelayanan Pasar | | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Disperindag |
| 7 | Penyedotan Kakus | | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Dinas LH |
| 8 | Pengendalian Menara Telekomunikasi | | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | PUPR |

| NO | URAIAN | JUMLAH WP/ TRANSAKSI | TARGET ETPD | | | | | | | | | | PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | Semi Digital | Digital | Semi Digital | Digital | Semi Digital | Digital | Semi Digital | Digital | Semi Digital | Digital | |
| B | RETRIBUSI JASA USAHA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Retribusi Terminal | | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Dishub |
| 2 | Retribusi Rumah Potong Hewan | | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Disnakeswan |
| 3 | Retribusi Tempat Pelelangan Ikan | | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Dinas Perikanan |
| 4 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Dinas PUPR, Dinas Perikanan, Dinas LH, Dinas Perkim |
| 5 | Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga | | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Dispora dan Disbudpar |
| 6 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Dinas Perikanan, Dinas Pertanian |
| C | RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persetujuan Bangunan Gedung (IMB) | | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | PUPR |
| 2 | Retribusi Izin Trayek | | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Dishub |
| 3 | Perpanjangan IMTA/PTKA | | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Disnaker |
| 4 | Retribusi Izin Usaha Perikanan | | 98% | 2% | 95% | 5% | 90% | 10% | 85% | 15% | 80% | 20% | Dinas Perikanan |

BUPATI LEBAK

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA